

# **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADUAN PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA MALANG**

**(Studi Kasus Permasalahan Sampah Dalam Implementasi Kebijakan  
Pengaduan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang)**

## **SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar  
Sarjana Strata 1 (S1) Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Dengan Minat Utama Reformasi  
Pemerintahan

Oleh:

**Armand Akbar Algadrie**  
**NIM. 115120600111002**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**MALANG**

**2018**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADUAN PERMASALAHAN  
LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA MALANG**

**(Studi Kasus Tentang Permasalahan Sampah Dalam Implementasi  
Kebijakan Pengaduan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang)**

**SKRIPSI**

**Disusun Oleh:**

**ARMAND AKBAR ALGADRIE**

**NIM 115120600111002**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing**

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Dra. Alifiulahtin Utaminingsih, M.Si  
NIK. 2012 09670409 1002

Ahmad Zaki Fadlur Rahman, S.IP., MA  
NIK. 2018 07891227 1001

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADUAN PERMASALAHAN  
LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA MALANG**

**(Studi Kasus Tentang Permasalahan Sampah Dalam Implementasi  
Kebijakan Pengaduan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang)**

**SKRIPSI**

**Disusun Oleh:**

**ARMAND AKBAR ALGADRIE**

**NIM 115120600111002**

Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam ujian Sarjana Ilmu Pemerintahan pada

Tanggal 21 Desember 2018

Tim Penguji:

Ketua Majelis Penguji

Sekretaris Majelis Penguji

Fathur Rahman, S.IP, MA  
NIK. 2011098204291001

Laode Machdani Afala, S.IP, MA  
NIK. 2016078703181001

Anggota Majelis Penguji 1

Anggota Majelis Penguji 2

Dr.Dra.Alifiulahtin Utaminingsih, M.Si  
NIK. 2012 09670409 1002

Ahmad Zaki Fadlud Rahman, S.IP., MA  
NIK. 2018 07891227 1001

**Malang, 21 Desember 2018**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Prof. Dr. Unti Lodigdo., SE., M.Si., Ak

NIP. 1969 08141994 02 1001

## PERNYATAAN

Nama: Armand Akbar Algadrie

NIM: 115120600111002

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi berjudul **Implementasi Kebijakan Pengaduan Permasalahan Lingkungan Hidup di Kota Malang (Studi Kasus Tentang Permasalahan Sampah Dalam Implementasi Kebijakan Pengaduan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang)** adalah benar karya sendiri. Hal –hal yang bukan karya saya, dalam skripsi tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Malang, 21 Desember 2018

Yang memberi pernyataan

Armand Akbar Algadrie

NIM. 115120600111002

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti sampaikan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proses Skripsi dengan judul **“Implementasi Kebijakan Pengaduan Permasalahan Lingkungan Hidup di Kota Malang (Studi Kasus Tentang Permasalahan Sampah Dalam Implementasi Kebijakan Pengaduan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang)”** sebagai salah satu syarat yang harus ditempuh dalam menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) di Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya.

Sehubungan dengan skripsi yang peneliti laksanakan di Lingkup Pemerintah Kota Malang dalam proses penyusunannya, peneliti banyak mendapatkan masukan serta bimbingan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yng sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Alwalid Alhabib Hasan bin Abdurrahman Algadrie dan Ibu Hadijah Sumiati Story yang tidak henti-hentinya memberikan doa, motivasi serta pengarahan.
2. Keluarga besar alm. Alhabib Hasan bin Ali Aljufry yang senantiasa memberikan semangat dalam proses penyusunan skripsi dari awal hingga akhir.
3. Alhabib Jakfar bin Ali Al Masyhur yang senantiasa memberikan dorongan motivasi dalam menyelesaikan masa studi.

4. Dr. Dra. Alifiulahtin Utaminingsih, M.Si selaku dosen pembimbing selama proses penyusunan skripsi.
5. Ahmad Zaki Fadkur Rahman, S.IP., M.A selaku dosen pembimbing II selama proses penyusunan skripsi.
6. Joko Purnomo, S.IP.,MA selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan
7. Seluruh dosen serta karyawan Program Studi Ilmu Pemerintahan
8. Seluruh anggota Jamaah Squad ( Juwita Algadrie, Livia Alhabsyi, Latifa Alhabsy, Avivah Algadrie, Mursyida Algadrie, Muhammad Riski Algadrie, Muhammad Bagir Alhabsyi, Muhammad Ramadhan Bachmid) yang senantiasa mendukung dan memberikan motivasi semangat dala penyusunan skripsi dari awal hingga akhir.
9. Seluruh anggota Forum Komunikasi Islam Sumba Malang yang senantiasa memberikan doa dan semangat dalam proses penyusunan skripsi dari awal hingga akhir.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai kekurangan. Oleh karena itu, penulis mohon maaf kepada semua pihak apabila terjadi kesalahan. Semoga skripsi ini dapa memberikan manfaat bagi pembacanya.

Malang, 21 Desember 2018

Armand Akbar Algadrie



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan sepenuhnya kepada kedua orang yang paling penting dalam hidup saya, yang rela berkorban dan rela mengesampingkan keinginan beliau demi tercapainya cita-cita saya yaitu Alwalid Alhabib Hasan bin Abdurrahman Algadrie dan Ibu Hadijah Sumiati Story. Keluarga besar Alhabib Abdurrahman bin Hasan Algadrie dan Keluarga besar Harun Story yang tidak pernah lelah memberikan motivasi dan semangat untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Semoga dengan skripsi ini akan mengawali saya dalam mencapai cita-cita dan awal bagi saya dalam membahagiakan orang tua dan keluarga tercinta.

Allahumma Sholli Alaa Sayyidina Muhammad Waalaa Ali Sayyidina  
Muhammad....

Armand Akbar Algadrie, 2017.

## ABSTRAK

Armand Akbar Algadrie. (2018). Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Malang. **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADUAN PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA MALANG (Studi Kasus Tentang Permasalahan Sampah Dalam Implementasi Kebijakan Pengaduan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang). Dosen Pembimbing: Dr.Dra. Alifiulahtin Utaminingsih, M.Si dan Ahmad Zaki Fadlur Rahman, S.IP., M.A**

---

Peneliti menganalisis bagaimana upaya Pemerintah Kota Malang dalam mengimplementasikan kebijakan pengaduan permasalahan lingkungan hidup di Kota Malang. Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Malang yaitu pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang sebagai instansi yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan pengaduan permasalahan lingkungan hidup di Kota Malang. Peneliti dalam penelitian ini akan menggunakan teori implementasi kebijakan George Edwards III. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam menjabarkan pokok permasalahan yang akan diteliti. **Pertama**, Komunikasi. Komunikasi yang diterapkan dalam pelaksanaan kebijakan pengaduan permasalahan lingkungan sudah dinilai cukup baik karena terjalinnya komunikasi antara masyarakat dan pemerintah dalam hal ini petugas Dinas Lingkungan Hidup. **Kedua**, Sumber Daya. Dinas Lingkungan Hidup Masih memiliki kekurangan dalam pengadaan transportasi angkutan sampah dari tiap-tiap TPS di Kota Malang. **Ketiga**, Disposisi. Setiap pegawai yang diekrut Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang sudah sesuai dengan keahliannya masing-masing. **Keempat**, Struktur Birokrasi. Pembagian tugas dalam pelaksanaan pengaduan permasalahan lingkungan hidup di Kota Malang dirasa sudah cukup baik juga.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Sampah, Dinas Lingkungan Hidup.



## ABSTRACT

**Armand Akbar Algadrie. (2018). Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Brawijaya University, Malang. POLICY IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENTAL PROBLEMS IN MALANG CITY (Case Study of Waste Issues in the Implementation of Complaints Policy by the Malang City Environment Agency).**

**Supervisor: Dr.Dra. Alifiulahtin Utaminingsih, M.Sc and Ahmad Zaki Fadlur Rahman, S.IP.,MA**

---

The researcher analyzed how the efforts of Malang City Government in implementing the complaints policy on environmental problems in Malang City. This research was conducted in the Malang City area, namely the Department of Environment of Malang City as an agency that is related to the implementation of the policy of complaints about environmental problems in Malang City. The researcher in this study will use George Edwards III's policy implementation theory. In this study researchers will use a qualitative descriptive method in describing the subject matter to be examined. First, Communication. The communication applied in the implementation of the complaints policy on environmental problems has been considered to be quite good because of the communication between the community and the government in this case the Department of Environment staff. Second, Resources. The Environmental Agency still has shortcomings in the procurement of garbage transportation from each polling station in Malang City. Third, Disposition. Every employee recruited by the Malang City Environmental Agency is in accordance with their respective expertise. Fourth, Bureaucratic Structure. The division of tasks in the implementation of complaints about the problem of the environment in the city of Malang is considered good enough too.

**Keywords:** Policy Implementation, Waste, Environmental Agency.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR BAGAN.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR ISTILAH.....	xvii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5

BAB II KAJIAN TEORI.....	6
2.1 Kajian Empiris.....	6
2.2 Kajian Teoritis.....	16
2.2.1 Teori Implementasi Kebijakan Edwards III.....	16
2.2.2 Lingkungan Hidup.....	21
2.2.3 Jenis Lingkungan.....	22
2.2.4 Permasalahan lingkungan Hidup.....	23
2.2.5 Pengelolaan Sampah.....	25
2.2.5 Sumber Sampah.....	25
2.2.7 Jenis Sampah.....	28
2.2.8 Pengaduan.....	29
2.3 Kerangka Berpikir.....	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
3.1 Jenis Penelitian.....	32
3.2 Fokus dan Lokasi Penelitian.....	33
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	34
3.3.1 Informan.....	34
3.3.2 Dokumen.....	34
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.4.1 Wawancara.....	35

3.4.2 Observasi.....	36
3.4.3 Dokumentasi.....	36
3.5 Teknik Analisis Data.....	36
 BAB IV GAMBARAN UMUM DINAS LINGKUNGAN HIDUP.....	38
4.1 Profil Kota Malang.....	38
4.1.1 Kondisi Geografis.....	38
4.2 Profil Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang dan Sejarahnya.....	41
4.2.1 Tugas Pokok Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang.....	42
4.2.2 Fungsi Pokok Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang.....	44
 BAB V IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADUANPERMASALAHAN SAMPAH DI KOTA MALANG.....	50
5.1 Analisis Implementasi Pengaduan Permasalahn Sampah Kota Malang..	50
5.1.1 Komunikasi.....	50
5.1.2 Sumber Daya.....	51
5.1.3 Struktur Birokrasi dan Disposisi.....	51
5.2 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat.....	66
5.2.1 Faktor Pendukung.....	67
5.2.2 Faktor Penghambat.....	68

BAB VI PENUTUP.....	69
6.1 Kesimpulan.....	69
6.2 Rekomendasi.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN.....	73



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Studi Terdahulu.....	12
Tabel 2.3 Alur Kerangka Berpikir.....	31





## DAFTAR BAGAN

Bagan 2.2.1 Kerangka Teori Edwards III.....	16
Bagan 4.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang.....	46
Bagan 4.2 Alur Penanganan Pengaduan.....	47



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Wilayah Administratif Kota Malang.....	39
Gambar 4.2 Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang.....	41
Gambar 5.1 Aparatur, Prasarana dan Sarana Pengelolaan Kebersihan.....	51



## DAFTAR ISTILAH

Administratif	: Sebuah wilayah administratif yang dipimpin oleh Bupati.
Birokrasi	: Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hirarki.
BSM	: Bank Sampah Malang
Disposisi	: Catatan singkat yang berisi instruksi dari seorang atasan kepada bawahannya
Emisi GRK	: Zat, energy, atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk atau dimasukkannya kedalam udara yang mempunyai potensi sebagai unsur pencemar.
IKM	: Indeks Kepuasan Masyarakat
Implementasi	: Suatu tindakan rencana yang telah disusun secara cermat dan matang.
Kebijakan	: Rangkaian konsep dan asas yang mejadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.
Komprehensif	: Segala sesuatu yang bersifat luas dan lengkap, meliputi seluruh aspek atau ruang lingkup yang luas.
Konstitusional	: Suatu tindakan yang harus selalu didasarkan pada konstitusi yang telah ada.
Reduksi	: Reaksi pelepasan oksigen dari suatu senyawa.
Sosialisasi	: Proses penanaman kebiasaan atau nilai dari satu generasi ke generasi lainnyadalam sebuah kelompok atau masyarakat.
SPM	: Ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib pemerintah yang berhak diperoleh setiap warga.

SPP	: Tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik
TPA	: Tempat Pembuangan Akhir
TPS	: Tempat Pembuangan Sementara
UPT	: Satuan organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas operasional dan teknis dari organisasi induknya.
Verifikasi	: Pemeriksaan tentang kebenaran laporan atau pernyataan.
Wawancara	: Percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1.Latar Belakang

Hubungan interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya berada dalam suatu keseimbangan, makhluk hidup menjaga dan melestarikan lingkungan sedangkan lingkungan menyediakan segala kebutuhan makhluk hidup. Namun ketika keseimbangan tersebut terganggu, seperti yang sudah terjadi saat ini bahwa makhluk hidup dalam hal ini manusia melakukan kerusakan terhadap lingkungan baik itu dalam pembangunan maupun efek langsung dari pembangunan yaitu pencemaran lingkungan, maka yang akan terjadi yaitu berkurangnya sumber daya alam yang berimbas pada kebutuhan yang semakin sulit disediakan oleh lingkungan terhadap makhluk hidup.

Dengan permasalahan yang diciptakan oleh manusia sendiri, dibutuhkan inisiatif untuk dapat menghentikan perusakan lingkungan sehingga dapat memunculkan pemikiran bahwa tidak seharusnya lingkungan atau alam dijadikan bahan konsumsi kebutuhan manusia saja melainkan dapat dijadikan bahan produksi dengan catatan bahwa manusia berkewajiban untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Dari sini dapat dilihat bagaimana manusia yang didalamnya terdapat “pemerintah” dan “masyarakat” akan saling bekerja sama dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.

Kota Malang merupakan salah satu kota besar di Jawa Timur yang mana juga merupakan wilayah yang akan mendapatkan dampak dari permasalahan

seputar kerusakan lingkungan hidup. Hal ini dapat disebabkan oleh banyak faktor mulai dari peningkatan jumlah penduduk sampai dengan bagaimana perilaku masyarakat yang dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk akan semakin banyak yang acuh tak acuh dengan penggunaan sumber daya alam.

Dapat dicontohkan dengan banyaknya pembangunan yang setiap tahunnya dilakukan oleh berbagai pihak baik swasta maupun masyarakat umum, misalnya banyak bangunan tempat usaha mulai dari Rumah Toko (ruko), rumah makan, sampai dengan rumah kos. Bukan berarti semua yang menyebabkan permasalahan lingkungan, namun hal ini perlahan akan sedikit demi sedikit mengganggu sumber daya alam. Ketika akan dilakukannya pembangunan, tentunya lingkungan hijau akan digunakan sebagai lokasi pembangunan.

Studi kasus ini dilakukan untuk mengetahui dan memahami sesungguhnya bagaimana implementasi kebijakan pengaduan permasalahan lingkungan hidup di Kota Malang yakni Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang dalam menangani permasalahan lingkungan hidup khususnya permasalahan sampah yang meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk yang menempati wilayah Kota Malang. Kota Malang merupakan salah satu kota besar yang terdapat di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah populasi penduduk yang terus meningkat. Menurut survey Badan Pusat Statistik Kota Malang pada tanggal 3 Desember 2015 terkait sensus penduduk 2000 - 2010 jumlah penduduk Kota Malang mencapai 756.982 jiwa - 820.243 jiwa<sup>1</sup>. Menurut proyeksi penduduk Kota Malang tahun 2014-2018

---

<sup>1</sup> Dikutip dari website malangkota.bps.go.id pada tanggal 8 September 2018



diperkirakan mencapai jumlah 845.973–866.118 jiwa<sup>2</sup>. Jumlah tersebut peneliti cantumkan untuk memberi gambaran bagaimana peningkatan jumlah populasi penduduk yang signifikan mengingat Kota Malang merupakan salah satu kota pelajar yang menjadi tujuan bagi para pelajar dari berbagai daerah untuk menuntut pendidikan di perguruan-perguruan tinggi yang berada di Kota Malang. Tidak dapat disangkal Kota Malang juga merupakan salah satu kota tujuan wisata yang menjadi daya tarik bagi para wisatawan baik mancanegara maupun wisatawan domestik. Hal ini merupakan acuan untuk penulis melakukan penelitian terhadap studi kasus fungsi pengawasan dan pengaduan permasalahan lingkungan hidup di Kota Malang. Dikutip dari media harian JawaPos.com, Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang mencatat jumlah produksi sampah di Kota Malang sebanyak 664,62 ton per hari.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang No 10 tahun 2010 pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah sampai ke hilir yaitu pada fase produk yang berpotensi menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan daur ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.<sup>3</sup> Peraturan daerah ini diperlukan dalam rangka memastikan hukum bagi masyarakat dalam mendapatkan hak pelayanan

---

<sup>2</sup> Dikutip dari website malangkota.bps.go.id pada tanggal 8 September 2018

<sup>3</sup> Dikutip dari Peraturan Daerah Kota Malang No 10 tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah pada tanggal 18 Desember 2018

pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan dan juga kejelasan tugas serta wewenang Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah.

Penelitian ini mengkaji bagaimana Pemerintah Kota Malang melakukan fungsi kebijakan pengaduan terkait permasalahan lingkungan hidup dalam hal ini permasalahan sampah di Kota Malang yang mana setiap tahunnya cenderung semakin bertambah seiring dengan peningkatan populasi jumlah penduduk baik lokal maupun pendatang dari luar Kota Malang. Untuk melaksanakan segala kebijaka pengaduan permasalahan lingkungan hidup tentunya Pemerintah Kota Malang harus bekerja sama dengan berbagai pihak yang mendukung penanganan permasalahan lingkungan hidup di Kota Malang.

### **1.2.Rumusan Masalah**

Penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pengaduan permasalahan lingkungan hidup dalam kaitannya dengan permasalahan sampah di Kota Malang?
2. Apa saja problematika dalam melaksanakan kebijakan pengaduan permasalahan sampah di Kota Malang ?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah yang sudah ada, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pengaduan permasalahan lingkungan hidup dalam kaitannya dengan permasalahan sampah di Kota Malang ?
2. Apakah faktor pendukung dan faktor penghambat dalam melaksanakan fungsi kebijakan pengaduan permasalahan sampah di Kota Malang ?

### 1.4. Manfaat Penelitian

1. Kontribusi bagi Program Studi Ilmu Pemerintahan

Hasil penelitian ini diharap dapat menjadi masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan implemenasi kebijakan pengaduan permasalahan lingkungan hidup di Kota Malang.

2. Kontribusi bagi Civitas Akademika

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian lanjutan mengenai permasalahan lingkungan hidup dalam hal ini permasalahan sampah di Kota Malang.

3. Kontribusi bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang

Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah Kota Malang dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang dalam merumuskan dan menentukan kebijakan pengawasan pengaduan permasalahan lingkungan hidup di Kota Malang.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

Pada bab ini akan dibahas tinjauan tentang studi terdahulu serta menjelaskan teori yang akan digunakan terkait penelitian ini.

#### 2.1 Kajian Empiris

Peneliti melakukan penelitian pustaka dan hasilnya berupa catatan tentang beberapa hasil penelitian yang lain yang juga membahas tentang permasalahan lingkungan hidup dan yang menjadi fokus penulis adalah kebijakan mengenai pengelolaan sampah. Meskipun tidak sama persis dengan apa yang peneliti lakukan, paling tidak penelitian terdahulu menjadi referensi dalam pelaksanaan penelitian ini, antara lain:

*Pertama*, Sunarto, Sudharto P. Hadi, Purwanto, “Pengolahan Sampah di TPS Tlogomas Malang untuk Mereduksi Jejak Karbon”<sup>1</sup> yang terbit ditahun 2013. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jejak karbon pengolahan sampah di TPS Tlogomas di Kota Malang. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa peningkatan fungsi TPS dari tempat penampungan sementara menjadi tempat pengolahan sampah seperti yang telah dilakukan di TPS Tlogomas Malang bisa dijadikan sebagai salah satu cara mengurangi volume sampah yang dibuang di TPA. Kemudian pengolahan sampah di TPS Tlogomas pada saat ini berhasil menurunkan jejak karbon atau emisi GRK sebesar 72%. Penurunan jejak karbon dapat mencapai 89% dan penurunan volume sampah 88% apabila lebih dari 90%

---

<sup>1</sup> Dikutip dari *Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan* 2013

sampah diolah di TPS Tlogomas. Pengolahan sampah di TPS Tlogomas juga pada saat ini berhasil menurunkan volume sampah yang dibuang sebesar 68% dibandingkan apabila semua sampah dibuang ke TPA Supit Urang oleh karena penurunan volume sampah ini, usia pakai TPA Supit Urang akan semakin panjang apalagi apabila kapasitas pengolahan ditingkatkan.

*Kedua*, Sujiyanto, “Analisis Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Malang<sup>2</sup>” diterbitkan pada tahun 2016. Tulisan ini menjelaskan tentang betapa pentingnya upaya untuk menanggulangi masalah sampah dengan membentuk pengolahan sampah yang dekat dengan sumber sampah dengan cara membentuk Bank Sampah Malang. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terbentuk dan berjalannya Bank Sampah Malang memiliki dampak positif dan negatif dalam kegiatan pengolahan sampah. Dampak positif yang didapat adalah dapat mengurangi volume sampah yang diangkut ke TPA Supit Urang serta dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Sedangkan dampak negatifnya adalah masyarakat yang tidak mempunyai tempat untuk menyimpan barang-barangnya (sampah anorganik) menggunakan rumah orang lain yang kosong atau pos kamling, masyarakat yang mencari penghidupan atau mencari penghasilan dari sampah (pemulung, tukang rombeng, pasukan kuning) penghasilannya akan berkurang.

*Ketiga*, Yan Kurniawan, “Konsep Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah Oleh Bank Sampah Malang(BSM) Kota Malang dengan

---

<sup>2</sup> Sujiyanto. 2016. *Analisis Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Malang*. Program Magister Administrasi Publik. Universitas Tribuwana Tungadewi Malang.



menggunakan Pendekatan Partisipasi Emansipatoris<sup>3</sup> pada tahun 2017. Hasil dari penelitian menunjukkan konsep pemberdayaan yang dilakukan lembaga Bank Sampah Malang (BSM) terbagi kedalam tiga aspek, yakni *pertama*, pemberdayaan pola pikir masyarakat Kota Malang dengan cara pemberian pengetahuan tentang sampah. *Kedua*, pemberdayaan melalui cara memanfaatkan sampah menjadi uang dengan sistem dan manajemen BSM Kota Malang. *Ketiga*, pemberdayaan melalui pelatihan skill kerajinan menggunakan daur sampah.

Untuk pemberdayaan partisipatif dengan melibatkan masyarakat di BSM Kota Malang terdiri dari lima proses dimulai dari proses identifikasi, perencanaan, pelaksanaan, mitigasi/mengukur perkembangan, dan monitoring. Dan dampak BSM Kota Malang terbagi menjadi tiga hal, yakni dampak sosial, dampak ekonomi, dan dampak terhadap lingkungan.

*Keempat*, Sofyan Arif, “Pengelolaan Sampah Malang Raya Menuju Pengelolaan Sampah Terpadu yang Berbasis Partisipasi Masyarakat<sup>4</sup>” diterbitkan pada tahun 2013. Dalam tulisan ini diperoleh suatu model kebijakan pengelolaan sampah terpadu yang terdiri atas model pengelolaan sampah pada masyarakat dimana sebagai tempat timbulnya sampah. Maka agar sampah dapat dikelola dengan baik yang pertama harus diatur adalah bagaimana pemilahan sampah pada tempat timbulnya sampah, pada tahap ini pula dilakukan suatu pengurangan sampah dengan memberdayakan masyarakat yang mampu mengelola sendiri

---

<sup>3</sup> Kurniawan, Yan. 2017. *Konsep Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah Oleh Bank Sampah Malang(BSM) Kota Malang dengan Menggunakan Pendekatan Partisipasi Emansipatoris*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

<sup>4</sup> Arief, Sofyan. 2013. *Pengelolaan Sampah Malang Raya Menuju Pengelolaan Sampah Terpadu yang Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Malang.



sampahnya sehingga dapat dikatakan kunci keberhasilan ada pada pemilahan sampah pada masyarakat.

*Kelima*, Reba Anindyajati dan Iif Miftahul Ihsan, “Peluang Penguatan Bank Sampah Untuk Mengurangi Timbulan Sampah Perkotaan<sup>5</sup>” diterbitkan pada tahun 2017. Dalam tulisan ini didapatkan kesimpulan bahwa pengelolaan persampahan di Kota Malang dilakukan dengan pendekatan pelayanan persampahan oleh pemerintah kota maupun swadaya masyarakat. Besarnya angka pelayanan persampahan Kota Malang sebesar 68%, sedangkan 30% sisanya dilakukan oleh masyarakat. Kemudian jurnal ini menemukan bahwa dengan mengoptimalkan Bank Sampah Malang, maka volume sampah dapat direduksi secara lebih optimal sehingga akan sangat membantu Pemerintah Kota Malang dalam menangani permasalahan volume sampah yang semakin bertambah setiap tahunnya.

*Keenam*, Siti Sholikhah dan Welly Herumurti, “Timbulan dan Reduksi Sampah di Kecamatan Sukun Kota Malang<sup>6</sup>” diterbitkan pada tahun 2017. Pembahasan dalam jurnal ini memiliki kesamaan dengan jurnal kelima yang mana melihat timbulan sampah sebagai masalah yang harus segera diatasi dengan melakukan reduksi dengan memanfaatkan adanya Bank Sampah Malang

---

<sup>5</sup> Reba Anindyajati dan Iif Miftahul Ihsan. 2017. *Peluang Penguatan Bank Sampah Untuk Mengurangi Timbulan Sampah Perkotaan*.

<sup>6</sup> Siti Sholikhah dan Welly Herumurti. 2017. *Timbulan dan Reduksi Sampah di Kecamatan Sukun Kota Malang*. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP), Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

*Ketujuh, “Implementasi Kebijakan Adiwiyata dalam Upaya Mewujudkan Pendidikan Lingkungan Hidup di SMA Kota Malang”* oleh Ellen Landriany. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi kebijakan, mendeskripsikan faktor pendukung, faktor penghambat, dan memberikan deskripsi dalam mengatasi hambatan program adiwiyata pada Sekolah Menengah Atas pada Kota Malang. Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa kebijakan lingkungan hidup sudah tertuang dalam surat keputusan dan diintegrasikan dengan masing-masing mata pelajaran di sekolah. Proses sosialisasi juga sudah dilakukan oleh sekolah melalui beberapa kegiatan utama dengan pendekatan pada siswa untuk mendapatkan dukungan yang sempurna sehingga menciptakan sekolah yang berwawasan lingkungan.

*Kedelapan, “Kondisi Lingkungan Hidup di Jawa Tengah dan Pospek Pembangunan ke Depan”* oleh Sriyanto. Untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan maka diperlukan suatu kebijakan dan penetapan program-program pengelolaan lingkungan hidup yang melibatkan dan demi kesejahteraan masyarakat banyak. Dalam hal ini perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program-program pengelolaan lingkungan hidup harus melibatkan masyarakat didalam pengambilan keputusan.

*Kesembilan, “Jaminan Konstitusional Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup di Indonesia”* oleh Ashabul Kahpi. Fokus penelitian ini adalah bagaimana hak atas lingkungan hidup dijamin didalam konstitusi sehingga dalam

implementasinya tidak lagi terjadi pelanggaran hak-hak dalam hal ini termasuk hak lingkungan.

*Kesepuluh*, “Pusat Pertumbuhan di Kota Malang: Potensi dan Permasalahan” oleh Thomas Soseco. Pada penelitian ini, terdapat pembahasan terkait permasalahan lingkungan yang mana dimulai dengan jumlah penduduk yang besar namun tidak diimbangi kemampuan yang dimiliki tenaga kerja dan menyebabkan rendahnya pendapatan yang diterima. Akibatnya adalah semakin banyak masyarakat yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan akan perumahan dan pada akhirnya muncul daerah-daerah kumuh terutama di kawasan pusat kota. Hal ini tentunya menimbulkan masalah terhadap lingkungan hidup ketika semakin padat dan tidak terkendalinya kawasan kumuh tersebut.

Permasalahan berikutnya adalah pencemaran baik itu udara maupun air disebabkan kawasan-kawasan kumuh sehingga terjadinya penurunan kualitas air sungai. Masalah lainnya juga adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap drainase, akibatnya adalah setiap musim hujan datang selalu timbul genangan air.

*Kesebelas*, “Pengelolaan Lingkungan TPA Supit Urang Kota Malang” oleh Yan Akhbar Pamungkas. Dalam penelitian ini dibahas berdasarkan UU no. 32 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mendefinisikan sebagai upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Peneliti ingin mengkaji bagaimana pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup pada Tempat Pembuangan

Akhir (TPA) Supit Urang dalam pengelolaan persampahan pada landfill atau lahan TPA.

*Keduabelas*, “Pengaruh Perilaku Masyarakat yang Bermukim di Kawasan Bantaran Sungai Terhadap Penurunan Kualitas Air Sungai Karang Anyar Kota Tarakan” oleh Ira Puspita, Linda Ibrahim, dan Djoko Hartono. Pada penelitian ini menyimpulkan bahwa perilaku masyarakat diduga mempengaruhi penurunan kualitas air sungai yang mana diakibatkan tingkat pendidikan yang masih tergolong rendah sehingga dalam tingkat kualitas tenaga kerja yang juga rendah.

**Tabel 2.1**  
**Studi Terdahulu**

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Sunarto, Sudharto P. Hadi, Purwanto (2013)	Pengolahan Sampah di TPS Tlogomas Malang untuk Mereduksi Jejak Karbon	Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan fungsi TPS dapat mengurangi volume sampah pada TPA.	Penelitian ini lebih difokuskan bagaimana proses mereduksi jejak karbon di TPS Tlogomas.
2	Sujiyanto. Program Magister Administrasi Publik. Universitas Tribuwana Tungadewi (2016)	Analisis Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Malang (BSM)	Penelitian ini membahas bagaimana upaya menanggulangi permasalahan sampah melalui adanya bank sampah malang.	Penelitian ini hanya focus terhadap peran bank sampah malang dalam menanggulangi masalah sampah. Tanpa melihat upaya lainnya dari pemerintah kota malang.
3	Yan Kurniawan, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Universitas	Konsep Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan	Penelitian ini membahas salah satu upaya menanggulangi permasalahan	Penelitian ini focus terhadap pebedayaan partisipatif masyarakat oleh

	Islam Negeri Sunan Kalijaga (2017)	Sampah Oleh Bank Sampah Malang(BSM) Kota Malang dengan Menggunakan Pendekatan Partisipasi Emansipatoris	sampah yaitu dengan memanfaatkan sampah menjadi lapangan kerja dan efeknya adalah terjadinya pengurangan volume sampah pada beberapa TPS di kota malang.	bank sampah malang.
4	Sofyan Arif. Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Malang. (2013)	Pengelolaan Sampah Malang Raya Menuju Pengelolaan Sampah Terpadu yang Berbasis Partisipasi Masyarakat.	Penelitian ini juga membahas tentang bagaimana pengelolaan sampah di masyarakat.	Penelitian ini hanya focus pada masyarakat, tidak melihat dari pihak pemerintah kota malang dan pihak swasta dalam proses pengolahan sampah di kota malang.
5	Reba Anindyajati dan Iif Miftahul Ihsan. Pusat Teknologi Lingkungan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Gedung Geostek 820, Puspiptek, Tangerang Selatan, Banten.(2017)	Peluang Penguatan Bank Sampah untuk Mengurangi Timbulan Sampah Perkotaan.	Penelitian ini membahas upaya menanggulangi permasalahan sampah melalui adanya bank sampah malang.	Penelitian ini lebih fokus terhadap pengoptimalisasian BSM yang akan sangat bermanfaat dalam upaya mengurangi volume sampah di Kota Malang.
6	Siti Sholikhah dan Welly Herumurti. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP), Institut Teknologi	Timbulan dan Reduksi Sampah di Kecamatan Sukun Kota Malang.	Penelitian ini membahas upaya menanggulangi permasalahan timbulan sampah melalui adanya bank sampah malang.	Penelitian lebih difokuskan pada ruang lingkup yang lebih kecil yaitu di Kecamatan Sukun.



	Sepuluh Nopember. (2017)			
7	Ellen Landriany. Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan. 2014	Implementasi Kebijakan Adiwiyata dalam Upaya Mewujudkan Pendidikan Lingkungan Hidup di SMA Kota Malang	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan dapat menjelaskan implementasi kebijakan, faktor pendukung, faktor penghambat, dan menjelaskan dalam mengatasi hambatan kebijakan terkait lingkungan hidup.	Penelitian ini lebih difokuskan pada kebijakan Adiwiyata dalam mewujudkan pendidikan lingkungan hidup di SMA Kota Malang.
8	Sriyanto. Jurusan Geografis FIS-UNNES.	Kondisi Lingkungan Hidup di Jawa Tengah dan Prospek Pembangunan ke Depan	Penelitian ini membahas bagaimana mengatasi permasalahan lingkungan hidup yang dewasa ini lebih berorientasi pada ekonomi, sehingga mengakibatkan terhambatnya pembangunan yang berorientasi pada berwawasan lingkungan.	Penelitian ini lebih fokus terhadap faktor pembangunan dalam menangani permasalahan lingkungan hidup.
9	Ashabul Kahpi. Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin Makassar	Jaminan Konstitusional Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup di Indonesia	Penelitian ini menjelaskan bagaimana upaya dalam menangani permasalahan lingkungan hidup.	Penelitian ini lebih fokus terhadap jaminan konstitusional terhadap hak atas lingkungan hidup di Indonesia.



10	Thomas Soseco. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan. 2011	Pusat Pertumbuhan di Kota Malang: Potensi dan Permasalahan	Penelitian ini menjelaskan bagaimana permasalahan lingkungan dapat terjadi dimulai dari peningkatan jumlah penduduk.	Penelitian ini memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup yaitu hanya pada pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk di kawasan padat penduduk.
11	Yan Akhbar Pamungkas. Jurusan Peencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Brawijaya.	Pengelolaan Lingkungan TPA Supit Urang Kota Malang	Penelitian berlandaskan upaya melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.	Penelitian ini lebih fokus pada pengelolaan persampahan pada lahan TPA.
12	Ira Puspita, Linda Ibrahim, dan Djoko Hartono	Pengaruh Perilaku Masyarakat yang Bermukim di Kawasan Bantaran Sungai Terhadap Penurunan Kualitas Air Sungai Karang Anyar Kota Tarakan	Penelitian ini membahas bagaimana dapat terjadi permasalahan lingkungan seperti penurunan kualitas air sungai akibat perilaku masyarakat.	Penelitian ini lebih fokus pada satu permasalahan lingkungan hidup yaitu penurunan kualitas air sungai, tanpa melihat faktor-faktor lainnya.

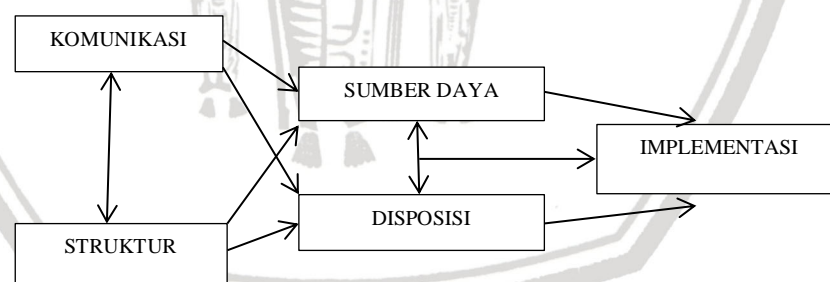
Sumber: Diolah oleh peneliti dari berbagai sumber tahun 2018

## 2.2 Kajian Teoritis

### 2.2.1 Teori Implementasi Kebijakan Edwards III

Pada penelitian ini, peneliti memilih untuk menggunakan teori dari George C. Edwards III dalam buku Joko Widodo yang berjudul *Analisis Kebijakan Publik*<sup>7</sup> yang mana menjelaskan terkait beberapa faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan membutuhkan adanya beberapa komponen yang terkait sehingga menjadi lebih terarah. Teori implementasi kebijakan publik oleh Edwards III menunjukkan empat variabel yang berperan penting dalam keberhasilan implemenasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi<sup>8</sup>. Hal ini dianggap lebih relevan ketika dikaitkan dengan persoalan impelementasi yang sering terjadi dalam kegiatan ataupun aktivitas kebijakan publik.

**Bagan 2.2.1 Kerangka Teori Edwards III**



**Sumber: Widodo, 2010. Analisis Kebijakan Publik.**

<sup>7</sup> Edwards III dalam buku Joko Widodo, 2010, *Analisis Kebijakan Publik*, Bayumedia, Malang, hlm. 97

<sup>8</sup> Dwiyanto Indiahono, 2009, *Kebijakan Publik*, Gava Media, Yogyakarta. hlm.31

## 1. Komunikasi

Yaitu suatu kegiatan manusia dalam menyampaikan apa yang dipikirkan dan dirasakan, harapan ataupun pengalaman kepada orang lain. Faktor komunikasi merupakan faktor yang sangat penting yang mana dalam setiap proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan “bagaimana hubungan yang dilakukan”. Hal ini dikaitkan dengan kegiatan para actor kebijakan, tentang apa yang menjadi standard dan tujuan secara terhuubung dari berbagai informasi.

Pernyataan diatas menjelaskan masalah yang dapat muncul karena struktur komunikasi yang serba kurang antara organisasi pelaksana dan objek-objek kebijakan. Indikator-indikator dalam variabel komunikasi dalam teori implementasi kebijakan Edward III antara lain<sup>9</sup>:

- a. Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya kepada pelaksana kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- b. Dimensi kejelasan menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang dimaksud, ditujukan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan

---

<sup>9</sup> Op.Cit

serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.

- c. Dimensi Konsistensi diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

## 2. Sumber Daya

Menunjukkan setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai yang mana sumber daya itu meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, sumberdaya peralatan, dan sumberdaya kewenangan. Kemudian dijelaskan didalam teori implementasi kebijakan Edward III antara lain:

### a. Sumber Daya Manusia

Indikator ini merupakan hal yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan, karena sebaik apapun kerangka kebijakan dibuat apabila tidak diimbangi oleh keahlian dari pada staff ataupun kualitas manusia yang kurang memadai maka kebijakan tersebut tidak akan mampu berjalan dengan baik dan efektif<sup>10</sup>.

### b. Sumber Daya Anggaran

Anggaran yang terbatas menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Selain untuk melaksanakan program atau kebijakan hal lain dalam sumber daya anggaran yang mampu mempengaruhi proses implementasi kebijakan

---

<sup>10</sup> Ibid.98

yaitu terbatasnya insentif yang diberikan kepada aktor kebijakan menyebabkan gagalnya pelaksanaan kebijakan<sup>11</sup>.

c. Sumber Daya Peralatan

Hal ini merupakan sarana yang digunakan untuk mengoperasionalkan suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam pelaksanaan pelayanan dalam implementasi kebijakan<sup>12</sup>.

d. Sumber Daya Kewenangan

Hal ini tidak kalah pentingnya dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Kewenangan yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga atau instansi akan sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Kewenangan ini menjadi sangat penting ketika dihadapkan pada suatu masalah dan mengharuskan untuk secepatnya diselesaikan dengan suatu keputusan.

3. Disposisi

Diartikan sebagai kemauan, keinginan dan kecenderungan para aktor kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan<sup>13</sup>.

Berikut indikator yang mempengaruhi disposisi antara lain<sup>14</sup>:

a. Pengangkatan Birokrasi

---

<sup>11</sup> Ibid.101

<sup>12</sup> Ibid.102

<sup>13</sup> Ibid.104

<sup>14</sup> Edwards III dalam Agustinus Leo, 2006, *Politik dan Kebijakan Publik*, AIPI: Bandung, hlm.159



Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang akan dihadapi saat implementasi kebijakan bila anggota yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih tinggi. Oleh karena itu pengangkatan dan pemilihan anggota pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan lebih khusus lagi pada kepentingan masyarakat sebagai sasaran kebijakan.

b. Insentif

Merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para actor kebijakan dengan memanipulasi insentif sehingga diharapkan dengan adanya hal ini yang diberikan maka para aktor kebijakan dapat bekerja secara optimal sehingga tujuan dari dibentuknya kebijakan tersebut dapat tercapai.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian wewenang, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya. Ada dua indikator yang utama didalam struktur birokrasi yaitu *Standart Operational Procedure (SOP)* dan Fragmentasi<sup>15</sup>:

a. SOP

Merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja kompleks dan luas.

---

<sup>15</sup> Edwards III dalam Budi Winarno, 2005, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Press: Yogyakarta. Hlm.150

b. Fragmentasi

Hal ini merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan terhadap beberapa bagian yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi<sup>16</sup>

### 2.2.2 Lingkungan Hidup

Menurut Emil Salim bahwa lingkungan hidup diartikan sebagai benda, kondisi, keadaan, dan pengaruh yang berada didalam ruang atau wilayah yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Ruang lingkungan hidup dibatasi oleh faktor-faktor yang dapat dijangkau manusia semisal faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, dan sosial<sup>17</sup>.

Menurut Otto Soemarwoto, lingkungan hidup adalah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang kita tempati dan mempengaruhi kehidupan kita. Secara teoritis ruang yang dimaksud tidak terbatas jumlahnya<sup>18</sup>. Kemudian menurut UU tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mana diartikan sebagai kesatuan, dan makhluk hidup termasuk didalamnya manusia dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Manusia

---

<sup>16</sup> Ibid.155

<sup>17</sup> Emil Salim, 1982, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara. Jakarta.

<sup>18</sup> Otto Soemarwoto, *Indonesia Dalam Kancah Isu Lingkungan Global*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 1972

hendaknya memahami kalau alamlah yang memberi kehidupan dan penghidupan baik secara langsung maupun tidak langsung<sup>19</sup>.

### 2.2.3 Jenis Lingkungan

Secara garis besar, lingkungan hidup manusia dapat digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu:

1. Lingkungan Fisik (*physical environment*)

Lingkungan fisik adalah segala sesuatu di sekitar makhluk hidup yang berbentuk benda mati seperti, rumah, kendaraan, gunung, udara, sinar matahari, dan lain-lain semacamnya.

2. Lingkungan Biologis (*biological environment*)

Lingkungan Biologis adalah segala sesuatu yang berada di lingkungan manusia yang berupa organisme hidup lainnya selain dari manusia itu sendiri, binatang, tumbuhan, jasad, renik (plankton) dan lain-lain.

3. Lingkungan Sosial (*social environment*)

Lingkungan sosial adalah manusia-manusia lainnya yang berada disekitar seperti keluarga, tetangga, teman, dan lain-lain.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Dikutip dari Undang-Undang no 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>20</sup> Ninik Suparmi, *Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika. Jakarta. 1994, 15

#### 2.2.4 Permasalahan Lingkungan Hidup

Permasalahan lingkungan hidup sebagian besar bersumber dari perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab dan tidak peduli sehingga hanya mementingkan diri sendiri. Manusia saat ini cenderung terarah kepada sifat konsumtif yang mana manusia menggunakan sumber daya alam sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan ketersedia dari alam itu sendiri<sup>21</sup>.

Menurut Supriadi, lingkungan hidup adalah sumber daya alam memiliki peran yang sangat strategis terhadap keberadaan makhluk ciptaan Tuhan termasuk manusia<sup>22</sup>. Menurut Siti Sundari Rangkuti, bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dilihat dari bentuk dan isinya, diimbangi dengan keharusan bagi pemerintah untuk mengarsipkan kebijakan dan melakukan tindakan yang mendorong peningkatan upaya melestarikan lingkungan hidup<sup>23</sup>. Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan makhluk hidup, diantaranya manusia beserta perilakunya yang dapat mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia itu sendiri dan makhluk hidup lainnya<sup>24</sup>.

Kemudian dalam UU juga menyebutkan bahwa Pemerintah wajib menyelenggarakan urusan pemerintahannya dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

<sup>21</sup> A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002.

<sup>22</sup> Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

<sup>23</sup> Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Lingkungan Nasional*, 2000.

<sup>24</sup> Dikutip dari [http://www.academia.edu/16804442/Pengertian\\_dari\\_lingkungan\\_hidup](http://www.academia.edu/16804442/Pengertian_dari_lingkungan_hidup) pada 6 September

serta menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan pelestarian ekosistemnya<sup>25</sup>.

Pembangunan yang berwawasan lingkungan seperti dalam undang-undang No. 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelola lingkungan hidup (UULH), pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan untuk meningkatkan mutu hidup.<sup>26</sup> Namun sangat sedikit yang dapat kita dapatkan dalam pembangunan dewasa ini yang berwawasan lingkungan, melainkan pembangunan saat ini lebih berorientasi pada kepentingan ekonomi.

Dapat kita perhatikan ada tiga faktor yang memicu adanya penyebab kerusakan lingkungan hidup yaitu:<sup>27</sup>

1. Pertambahan jumlah penduduk
2. Tipisnya sumber daya alam dan rusaknya teknologi, yang disebabkan oleh minimnya sumberdaya manusia yang hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi.
3. Undang-undang lingkungan hidup, yang sampai saat ini hanya menjadi sebuah panduan saja.

---

<sup>25</sup> Dikutip dari Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>26</sup> Ibid, 58

<sup>27</sup> Arief Zayyin, *Arti Keagungan dan Keindahan Alam, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia*. Jakarta. 2002. 6



### 2.2.5 Pengelolaan Sampah

Menurut UU Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa pengertian sampah adalah seluruh sisa kegiatan manusia yang dilakukan sehari-hari dan/atau dari proses alam yang berciri khas padat<sup>28</sup>. Kemudian pengertian sampah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah barang yang dibuang oleh pemiliknya karena tidak terpakai lagi atau tidak diinginkan lagi seperti kotoran, kaleng minuman, dedaunan, dan kertas bekas.

Pengertian sampah menurut Azwar adalah sebagian dari sesuatu yang tidak digunakan, disenangi, atau sesuatu yang tidak digunakan, tidak disenangi, atau sesuatu yang harus dibuang yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan manusia (termasuk kegiatan industri) tetapi bukan biologis karena kotoran manusia (human waste) tidak termasuk didalamnya<sup>29</sup>. Sedangkan menurut Hadiwijoto, sampah adalah sisa-sisa bahan yang telah mengalami perlakuan baik yang telah diambil bagian utamanya, telah mengalami pengolahan, dan sudah tidak lagi bermanfaat, dari segi ekonomi sudah tidak ada harganya serta dari segi lingkungan dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan kelestarian alam<sup>30</sup>.

### 2.2.6 Sumber Sampah

Menurut Depkes RI tentang pembuangan sampah (1987) sumber sampah dapat diklasifikasikan dalam berbagai kategori yaitu:

---

<sup>28</sup> Dikutip dari Undang-Undang no 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

<sup>29</sup> Azwar, *Definisi Pengelolaan Sampah*. Rineka Cipta, Jakarta. 2010.

<sup>30</sup> Hadiwijoto, S. *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*. Yayasan Idayu, Jakarta, 1983.



a. Pemukiman Penduduk

Pada tempat pemukiman biasanya sampah dihasilkan oleh suatu keluarga tunggal atau beberapa keluarga yang tinggal dalam suatu bangunan atau asrama biasanya terdapat di kota atau daerah suburban. Jenis sampah yang dihasilkan biasanya sisa makanan, dan bahan-bahan sisa sari pengolahan makanan atau sampah basah (garbage), sampah kering (rubbish) abu dan sampah-sampah khusus.

b. Tempat-tempat umum dan tempat-tempat perdagangan

Tempat umum adalah tempat yang dimungkinkan banyaknya orang yang berkumpul dan melakukan kegiatan termasuk tempat-tempat perdagangan. Tempat-tempat tersebut mempunyai potensi cukup besar dalam menghasilkan sampah. Jenis sampah yang dihasilkan dapat berupa sisa-sisa makanan (sampah basah), sampah kering, abu, sisa-sisa bahan bangunan, sampah khusus dan kadang-kadang juga terdapat sampah yang berbahaya.

c. Sarana pelayanan masyarakat milik pemerintah

Yang dimaksud dengan sarana pelayanan masyarakat, misalnya:

- a. Tempat-tempat hiburan umum (taman)
- b. Jalan umum
- c. Tempat-tempat parker
- d. Tempat-tempat pelayanan kesehatan
- e. Komplek militer

- f. Gedung-gedung pertemuan
- g. Tempat wisata
- h. Sarana pemerintahan yang lain

Tempat tersebut diatas biasanya menghasilkan sampah khusus dan sampah kering.

d. Indusri berat-ringan

Dalam pengertian ini termasuk :

- a. Pabrik-pabrik produksi barang
- b. Sumber-sumber alam misalnya sumber energy
- c. Perusahaan kimia
- d. Perusahaan kayu
- e. Perusahaan logam
- f. Tempat pengelolaan air kotor/air minum

(Yang dimaksud dalam pengrtian ini adalah usaha pengolahan air minum atau pengolahan air kotor dari kota dan juga pengolahan air kotor industry)

- g. Dan lain-lain kegiatan industry, baik yang hanya bersifat distribusi, ataupun memproses suatu bahan mentah.

Sampah yang dihasilkan dari tempat ini biasanya sampah basah, sampah kering, abu, sisa-sisa bahan bangunan, sampah khusus dan sampah berbahaya.

e. Pertanian

Sampah dihasilkan dari tanaman atau binatang. Dari daerah petanian ini misalnya sampah dari kebun, kandang, ladang atau sawah. Sampah yang dihasilkan berupa bahan-bahan makanan yang membusuk sampah pertanian, pupuk, maupun bahan pembasmi serangga tanaman.

### 2.2.7 Jenis Sampah

Bahar (1986) menyatakan berdasarkan jenisnya, sampah diklasifikasikan atas beberapa kelompok, antara lain<sup>31</sup> :

1. *Garbage*, yaitu sampah yang diperoleh dari sisa pengolahan, sisa pemasakan, atau sisa makanan yang telah membusuk, tetapi masih dapat digunakan sebagai makanan oleh organisme lainnya, seperti insekta, binatang pengerat. Sampah jenis ini biasanya bersumber dari industri pengolahan makanan.
2. *Rubbish*, yaitu sampah sisa pengolahan yang tidak mudah membusuk dan dapat pula dibagi atas dua golongan. Pertama sampah yang tidak mudah membusuk tapi mudah terbakar, seperti kayu, bahan plastik kain, bahan sintetik. Kedua adalah sampah yang tidak mudah membusuk dan tidak mudah terbakar, seperti metal, kaca, keramik, dan tulang hewan.
3. *Ashes dan cinder*, yaitu berbagai jenis abu dan arang yang berasal dari kegiatan pembakaran.

---

<sup>31</sup> Bahar, Yul H. *Teknologi Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*. Pt. Wacana Utama Pramesti. Jakarta. 1986

4. *Dead animal*, yaitu sampah yang berasal dari bangkai hewan, dapat berupa bangkai hewan peliharaan maupun hewan liar.
5. *Street sweeping*, yaitu sampah atau kotoran yang berserakan disepanjang jalan, seperti sisa pembungkus dan sisa makanan, kertas, daun, kayu, dan lain-lain.
6. *Indutri waste*, merupakan sampah yang berasal dari kegiatan industri, sampah jenis ini biasanya lebih homogeny bila dibandingkan dengan sampah jenis lainnya.

#### 2.2.8 Pengaduan

Pengaduan adalah penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan dari setiap pengadu kepada instansi penanggungjawab, mengenai terjadinya pelanggaran, potensi dampak dibidang lingkungan hidup dan kehutanan dari usaha kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan. Pengelolaan pengaduan adalah kegiatan yang meliputi penerimaan, penelaahan, verifikasi, perumusan laporan hasil dan tindak lanjut pengaduan. Hal-hal yang diutamakan dalam pengaduan adalah pencemaran lingkungan hidup dan perusakan lingkungan hidup baik itu secara langsung maupun tidak langsung.

Berikut objek pengaduan yang diupayakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang<sup>32</sup> :

- a. Usaha atau kegiatan yang tidak memiliki atau tidak sesuai dengan izin dibidang lingkungan hidup;
- b. Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- c. Perusakan hutan;
- d. Pengelolaan limbah B3 yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pembalakan liar;
- f. Pembakaran hutan dan lahan;
- g. Penambahan kawasan hutan dan lahan;
- h. Perburuan, peredaran, dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar illegal;
- i. Konflik tenurial kawasan hutan;
- j. Pemanfaatan sumber daya genetic dan pengetahuan tradisional;
- k. Usaha atau keinginan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup, kehutanan, atau konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya

Pengaduan dapat disampaikan kepada instansi penanggung jawab baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengaduan secara langsung dapat dilakukan dengan mendatangi dan menyampaikan pengaduan kepada sekretariat pengaduan atau pos pengaduan. Pengaduan secara tidak langsung dilakukan melalui media pengaduan dapat berupa telepon, faksimili, surat, surat elektronik, website, media social, pesan singkat, aplikasi pengaduan, dan media lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi.

Tahap pengelolaan pengaduan terdiri atas Penerimaan, Penelaahan, Verifikasi, Perumusan Hasil, dan Tindak Lanjut Hasil Pengaduan.

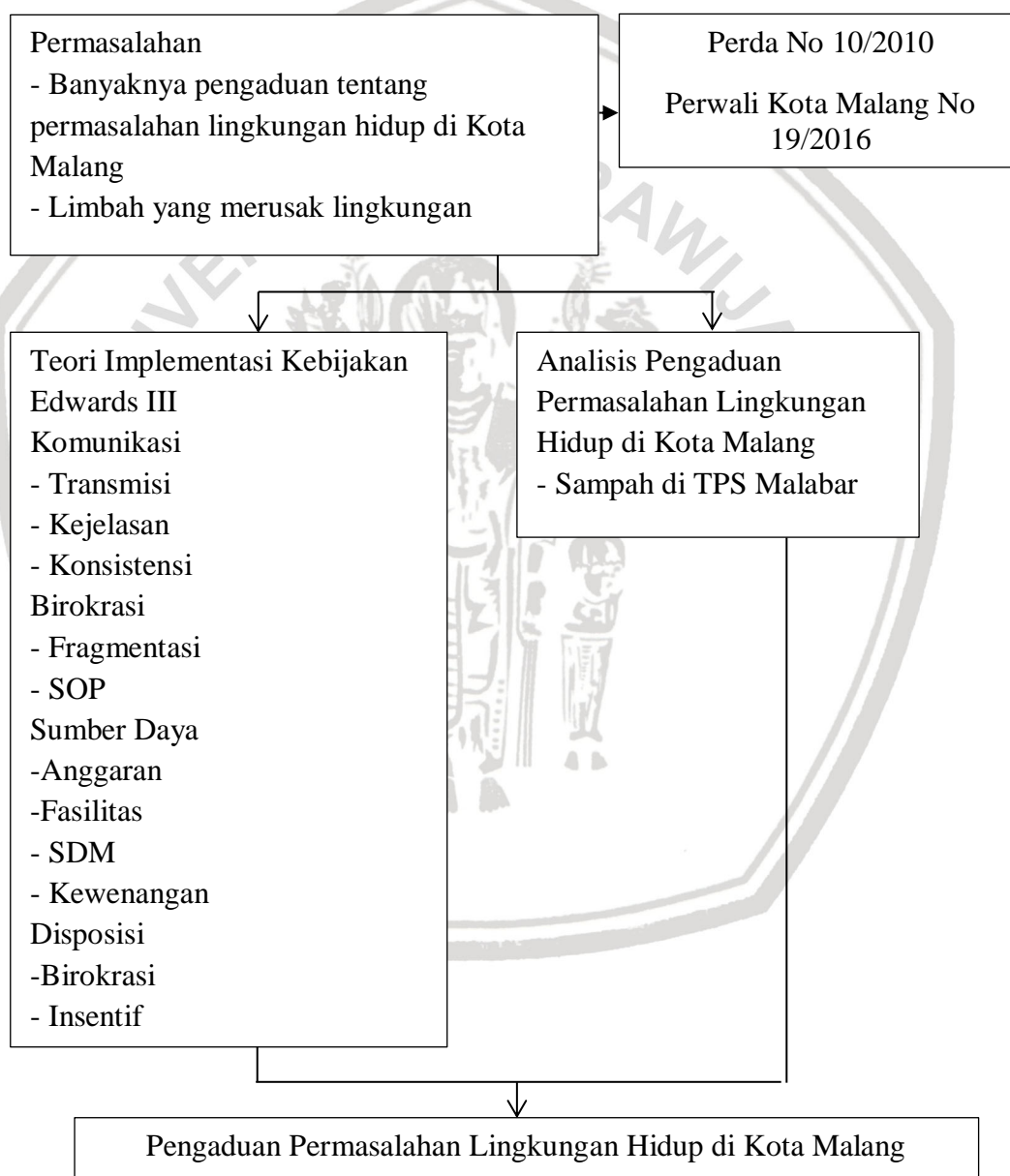
---

<sup>32</sup> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.22 /MENLKH /SETJEN / SET.1 /3 /2017

## 2.3 Kerangka Berpikir

Berikut adalah bagan yang telah peneliti buat guna mempertajam dan memperjelas pemikiran penelitian. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tahapan dalam proses penelitian.

**Bagan 2.1 Alur Kerangka Berpikir**



Sumber: Diolah Peneliti (2018)





### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### 1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan pertimbangan berkaitan dengan topik yang dibahas peneliti. Penelitian deskriptif ini membantu peneliti dalam mengemukakan permasalahan yang diangkat secara mendalam. Metode kualitatif merupakan suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dari orang atau subjek yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh sehingga dalam hal ini tidak bisa memasukkan individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesa, tetapi harus memandangnya sebagai suatu keutuhan<sup>1</sup>.

Melalui metode penelitian deskriptif, peneliti bertujuan mengaitkan kebijakan pemerintah terkait permasalahan lingkungan hidup di Kota Malang dengan fakta yang terjadi dilapangan. Penulis berharap dapat memberikan gambaran terkait seberapa efektif kebijakan yang telah dibuat, menjabarkan implementasi dari kebijakan, sampai dengan problematika yang dihadapi dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

---

<sup>1</sup> Moleong, J. Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Rosadakarya. Jakarta. 2007.hlm 3

## 1.2 Fokus dan Lokasi Penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu lingkup permulaan yang akan disajikan sebagai wilayah penelitian, sehingga peneliti akan memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang situasi yang sedang diteliti. Fokus penelitian juga sebagai upaya pencegahan terjadinya pembiasan didalam menjelaskan dan membahas masalah yang diteliti. Pada dasarnya, fokus penelitian adalah masalah pokok yang bersumber dari pengalaman penelitian atau melalui pengetahuan yang diperoleh melalui kepustakaan lainnya<sup>2</sup>.

Adapun fokus penelitian ini adalah :

1. Implementasi kebijakan pengaduan permasalahan lingkungan hidup dalam hal ini difokuskan pada permasalahan pengelolaan sampah di Kota Malang.
2. Faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pengaduan dalam menangani permasalahan lingkungan hidup di Kota Malang.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang sebagai instansi yang melaksanakan kebijakan pengawasan dan pengaduan permasalahan lingkungan hidup di Kota Malang. Hal ini menjadi pertimbangan teori yang akan peneliti gunakan untuk mencari kesesuaian kenyataan dilapangan. Dari lokasi penelitian ini peneliti akan menemukan fenomena atau peristiwa yang terjadi mulai dari pelaksanaan kebijakan sampai dengan evaluasi kebijakan sesuai fakta yang terjadi.

---

<sup>2</sup> Ibid. 97

### 1.3 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif, jenis dan sumber data dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu dan bersifat *sampling* yaitu dimana unit sampel yang dipilih semakin lama akan semakin terarah sejalan dengan fokus penelitian. Peneliti menggunakan metode wawancara dalam mengumpulkan data primer sehingga sumber data dalam penelitian ini disebut informan. Sedangkan untuk data sekunder peneliti langsung mendatangi lokasi tempat penelitian yang menurut peneliti bisa memberikan data-data sekunder sebagai pendukung dalam penelitian.

#### 1.3.1 Informan

Peneliti melakukan pengamatan terlebih dahulu, kemudian memilih informan sesuai dengan pertimbangan dan tujuan penelitian yang menguasai permasalahan baik di pemerintahan maupun di masyarakat. Kemudian untuk mendapat informan selanjutnya, peneliti meminta informasi untuk mendapatkan aktor selanjutnya yang kompeten dan bisa memberikan informasi sesuai dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan informan kunci sesuai dengan bidang dan jumlah informan ditetapkan sendiri oleh peneliti berdasarkan pertimbangan waktu dan tempat dimana untuk meneliti informan, selain itu juga tingkat pemahaman informan terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

#### 1.3.2 Dokumen

Teknik dokumentasi yang dipakai untuk memperoleh data melalui bahan-bahan tertulis berupa peraturan atau kebijakan-kebijakan lainnya yang berkaitan dengan pengawasan dan pengaduan permasalahan lingkungan hidup di Kota

Malang. Selain itu peneliti juga mencari data yang berhubungan dengan lokasi penelitian yang mana teknik ini dilakukan dalam rangka melengkapi informasi peneliti dan untuk mendapatkan data yang akurat.

#### 1.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik ini merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena kajian utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data tentu akan menyulitkan bagi peneliti untuk mendapatkan data yang memenuhi standard data yang ditetapkan<sup>3</sup>.

##### 1.4.1 Wawancara

Wawancara terdiri dari beberaa pertanyaan yang disiapkan peneliti untuk diajukan kepada informan mengenai topic penelitian melalui tatap muka dan peneliti merekam jawaban-jawaban tersebut<sup>4</sup>. Dalam penelitian ini, wawancara digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dari informan dalam hal Strategi Pengelolaan Sampah di Kota Malang.

- a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
- b. Kepala Bidang Bina Kemitraan dan Pengendalian Lingkungan Hidup
- c. Kepala Bidang Pelayanan Kebersihan
- d. Kepala UPT Tempat Pemrosesan Akhir
- e. Kepala UPT Penampungan dan Pengolahan Sampah

---

<sup>3</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan kualitatif, Kuantitatif, dan R&D)*. Alfabeta. Bandung. 2009.hlm 224.

<sup>4</sup> Emzir. *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rajawali. Jakarta. 2012.hlm 50

### 1.4.2 Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang mengacu pada kejadian, gejala ataupun suatu hal yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Observasi dilakukan peneliti untuk mengamati pelaksanaan kebijakan secara langsung di lapangan.

### 1.4.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan mengumpulkan data berupa gambar ataupun dokumen yang berkaitan dengan permasalahan pengelolaan sampah. Teknik ini bermanfaat untuk menambah sumber data yang dapat mendukung analisis kebijakan pengawasan dan pengaduan permasalahan sampah di Kota Malang.

## 3.5 Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman, terdapat tiga teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul<sup>5</sup>.

### a. Reduksi Data

Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan

---

<sup>5</sup> Miles, Methew B.A. Michael Huberman, Saldana. *Analisis Data Kualitatif*. Penerjemah Tjejep Rohendi Rohini. UI Press. Jakarta.



mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan, dan bagan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan akhir dalam penelitian.

Tujuan analisis data kualitatif yaitu agar peneliti mendapatkan makna hubungan variabel sehingga dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian. Prinsip pokok teknik analisis data kualitatif adalah mengolah dan menganalisis data yang terkumpul menjadi sistematis, teratur, terstruktur, dan mempunyai makna.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM DINAS LINGKUNGAN HIDUP

#### KOTA MALANG

Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan terkait gambaran umum objek penelitian yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Bab ini akan menjelaskan mengenai kondisi dari objek penelitian mulai dari wilayah sampai dengan tugas dan fungsi.

#### 1.1 Profil Kota Malang

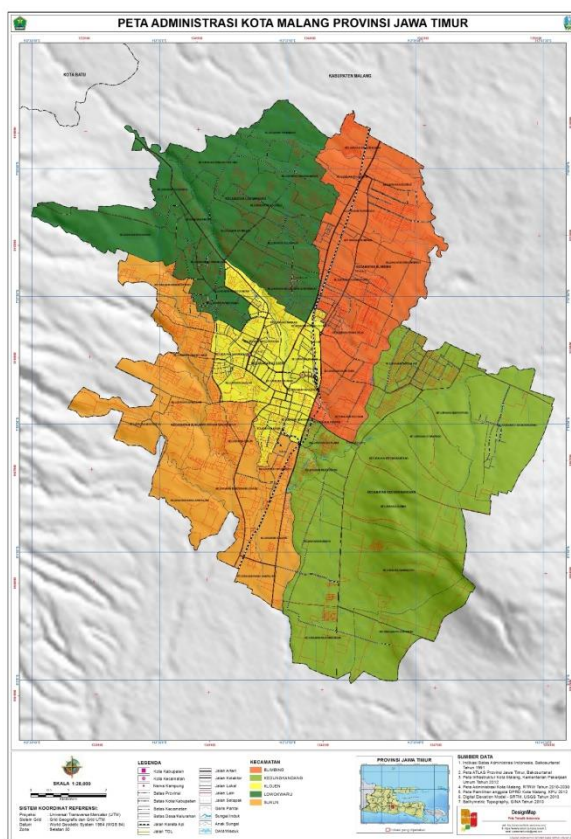
##### 4.1.1 Kondisi Geografis

Kota Malang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota ini terletak 90 km sebelah selatan Kota Surabaya, dan wilayahnya dikelilingi oleh Kabupaten Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur. Kekayaan etnis dan budaya yang dimiliki Kota Malang berpengaruh terhadap kesenian tradisional yang ada. Salah satunya yang terkenal adalah Wayang Topeng Malangan (Topeng Malang), namun kini semakin terkikis oleh kesenian modern. Gaya kesenian ini adalah wujud pertemuan tiga budaya (Jawa Tengahan, Madura, dan Tengger). Kota ini berada di dataran tinggi yang cukup sejuk, terletak 90 km sebelah selatan Kota Surabaya. Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur, dan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letaknya yang berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang

secara astronomis terletak  $112,06^{\circ}$  --  $112,07^{\circ}$ KBujur Timur dan  $7,06^{\circ}$  -  $8,02^{\circ}$ KLintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kec. Karangploso Kabupaten Malang
- Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang
- Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang
- Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang

**Gambar 4.1 Peta Wilayah Administratif Kota Malang<sup>1</sup>**



<sup>1</sup> Dikutip dari website [malangkota.go.id](http://malangkota.go.id)

Kota Malang sebagai Kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya mempunyai fungsi dan peran yang regional. Fungsi dan peran Kota Malang berdasarkan potensi wilayah dan fungsi perannya dengan wilayah sekitarnya terdiri atas : pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat pelayanan umum, pusat pendidikan, pusat pengelolaan bahan baku dan kegiatan industri, pusat pertumbuhan bagi wilayah sekitarnya, pusat pelayanan kesehatan, pusat transportasi, dan pusat pelayanan sarana wisata. Selanjutnya ditetapkan rencana fungsional kegiatan primer Kota Malang adalah industri, perdagangan, pergudangan dan transportasi.

Selanjutnya Kota Malang dalam menjalankan pemerintahan mengarah pada motto Kota Malang sebagai Kota Pendidikan, Kota Industri, dan Kota Pariwisata, yang kemudian dikenal dengan istilah “Tri Bina Cita”. Sejalan perkembangan tersebut urbanisasi terus berlangsung dan kebutuhan masyarakat akan perumahan meningkat di luar kemampuan pemerintah, sementara tingkat ekonomi urbanis sangat terbatas, yang selanjutnya akan berakibat timbulnya perumahan-perumahan liar yang pada umumnya berkembang di sekitar daerah perdagangan, di sepanjang jalur hijau, sekitar sungai, rel kereta api dan lahan-lahan yang dianggap tidak bertuan. Selang beberapa lama kemudian daerah itu menjadi perkampungan, dan degradasi kualitas lingkungan hidup mulai terjadi dengan segala dampak bawaannya. Gejala-gejala itu cenderung terus meningkat, dan sulit dibayangkan apa yang terjadi seandainya masalah itu diabaikan. Inilah yang kemudian menimbulkan permasalahan lingkungan hidup di Kota Malang.

## 1.2 Profil Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang dan Sejarahnya

Kota Malang telah membentuk kelembagaan pemerintahan di bidang lingkungan berbentuk Dinas Lingkungan Hidup secara structural dalam bentuk yang bertanggungjawab kepada Walikota Malang melalui Sekretaris Daerah. Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang berlokasi Jl. Mojopahit No. 1C Malang (0341-366385).

**Gambar 4.2**  
**Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang**



**Sumber: Dokumentasi Penulis**

Dalam upaya penyelesaian masalah lingkungan saat ini memerlukan koordinasi lintas instansi yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum. Keadaan lingkungan hidup saat ini di Kota Malang masih terbatas terhadap pemenuhan kebijakan pemanfaatan sumber daya yang digunakan oleh masyarakat. Sedangkan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan dan pemanfaatan sumber daya masih kurang maksimal, sehingga penggunaan kurang dapat dikendalikan.



Hal ini disebabkan keterlibatan masyarakat dalam upaya pengelolaan lingkungan kurang maksimal dan masih perlu adanya sosialisasi dan pembinaan tentang pemahaman pengelolaan lingkungan, sehingga masyarakat sadar dan peduli terhadap pentingnya memelihara lingkungan secara mandiri. Dari segi pelaksanaan penyelesaian dokumen kajian lingkungan dapat diselesaikan dengan baik, karena dokumen ini merupakan kelengkapan yang diperlukan dalam pengurusan ijin gangguan bagi tempat usaha.

#### **4.2.1 Tugas Pokok Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang**

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Lingkungan Hidup memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
2. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) di bidang lingkungan hidup;
3. Pengkoordinasian dalam penyusunan dan evaluasi program di bidang pengendalian dampak lingkungan dan konservasi sumber daya alam;
4. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pengawasan serta pemantauan di bidang pengendalian dampak lingkungan dan konservasi sumber daya alam;
5. Pelaksanaan kegiatan bidang pemungutan retribusi;
6. Pemberian pertimbangan teknis perijinan di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam;



7. Pemberian dan pencabutan perijinan di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam;
8. Pelaksanaan pengkajian dampak lingkungan;
9. Pemberdayaan kapasitas kelembagaan di bidang lingkungan hidup;
10. Pengembangan kesadaran masyarakat di bidang pengendalian lingkungan hidup;
11. Pengembangan sistem informasi lingkungan hidup;
12. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
14. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
15. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
16. Pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
17. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam;
18. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *web site* Pemerintah Daerah;
19. Penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
20. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;

21. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

#### **4.2.2 Fungsi Pokok Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang**

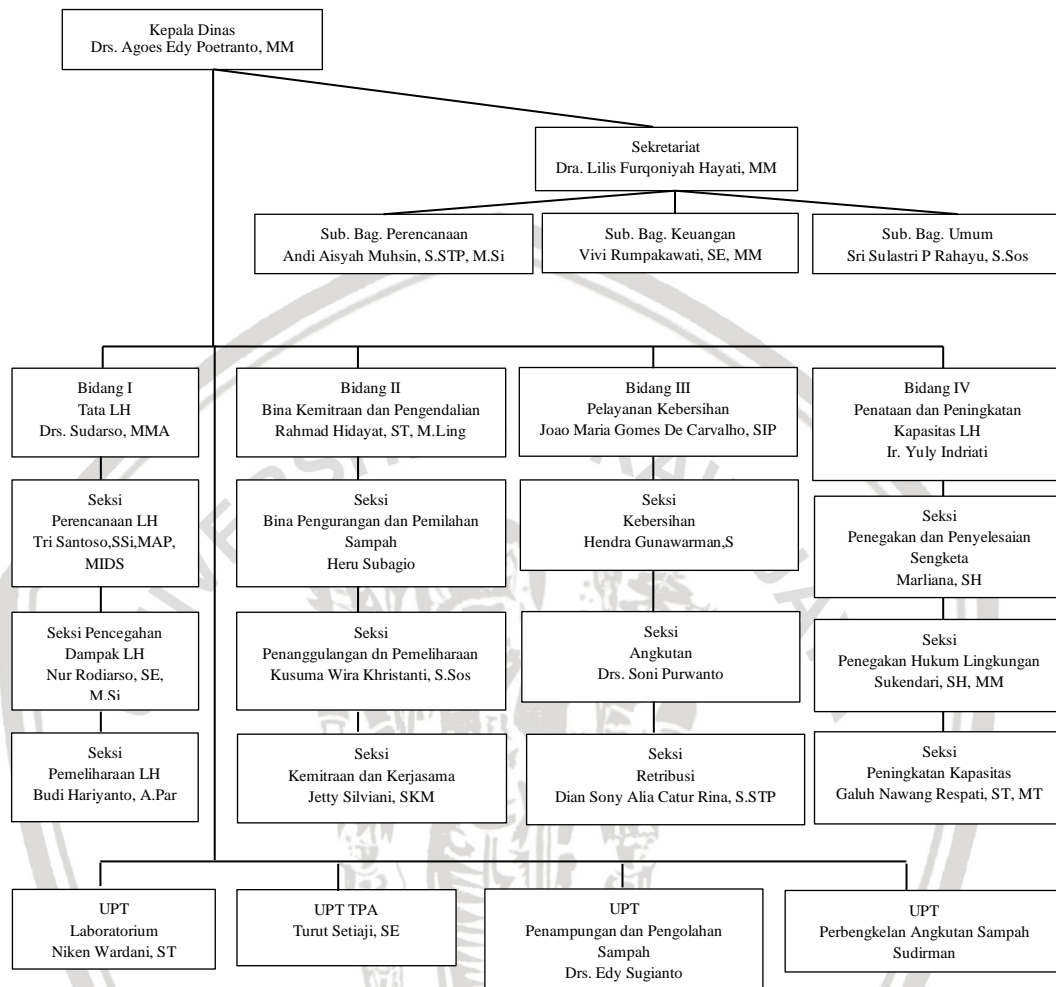
Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi pokok sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
2. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja di bidang lingkungan hidup;
3. Pengkoordinasian dalam penyusunan dan evaluasi program di bidang pengendalian dampak lingkungan dan konservasi sumber daya alam;
4. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pengawasan serta pemantauan di bidang pengendalian dampak dan konservasi sumber daya alam;
5. Pemberian pertimbangan teknis perijinan di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam;
6. Pemberian dan pencabutan perijinan di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sumberdaya alam;
7. Pelaksanaan kegiatan bidang pemungutan retribusi;
8. Pelaksanaan pengkajian dampak lingkungan;
9. Pemberdayaan kapasitas kelembagaan di bidang lingkungan hidup;
10. Pengembangan kesadaran masyarakat di bidang pengendalian lingkungan hidup;
11. Pengembangan sistem informasi lingkungan hidup;

12. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
14. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
15. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
16. Pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
17. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam;
18. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
19. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
20. Pengevaluasian dan pelaporan tugas pokok dan fungsi;
21. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagan 4.1

### Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang



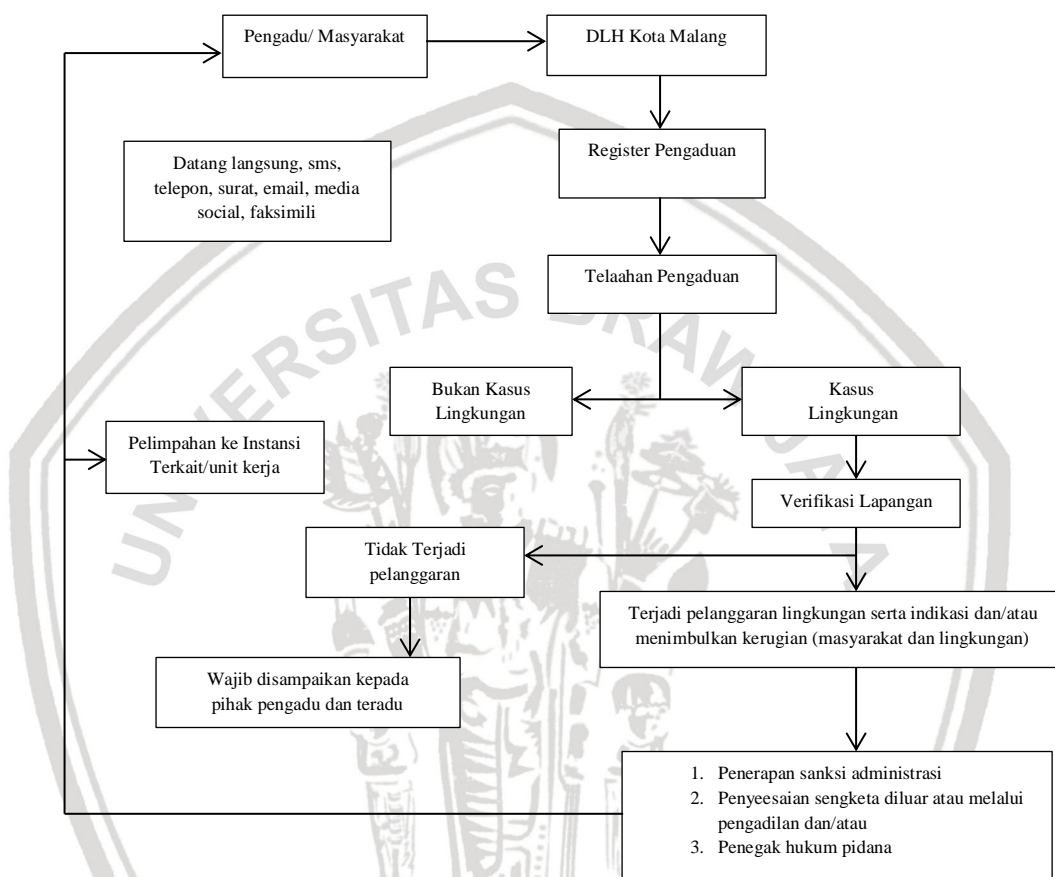
Sumber: Website Dinas Lingkungan Hidup<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Dikutip dari website dlh.malangkota.go.id pada tanggal 6 September.

### 1.3 Sekilas Tentang Alur Pengaduan Permasalahan Lingkungan Hidup

Bagan 4.2

#### Alur Penanganan Pengaduan

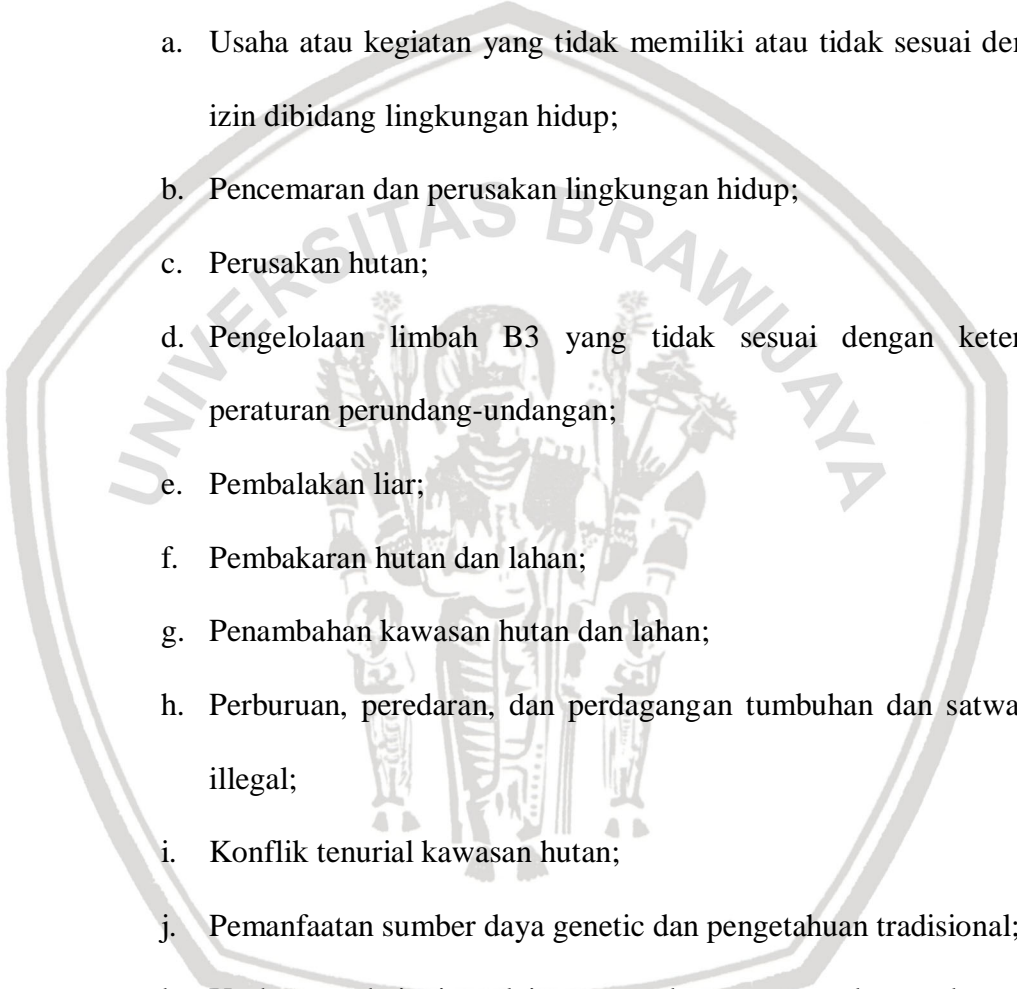


Sumber: dlh.malangkota.go.id (2018)

Pengaduan adalah penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan dari setiap pengadu kepada instansi penanggungjawab, mengenai terjadinya pelanggaran, potensi dampak dibidang lingkungan hidup dan kehutanan dari usaha kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan. Pengelolaan pengaduan adalah kegiatan yang meliputi penerimaan, penelaahan, verifikasi, perumusan laporan hasil dan tindak lanjut pengaduan. Hal-hal yang

diutamakan dalam pengaduan adalah pencemaran lingkungan hidup dan perusakan lingkungan hidup baik itu secara langsung maupun tidak langsung.

Berikut objek pengaduan yang diupayakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang<sup>3</sup> :

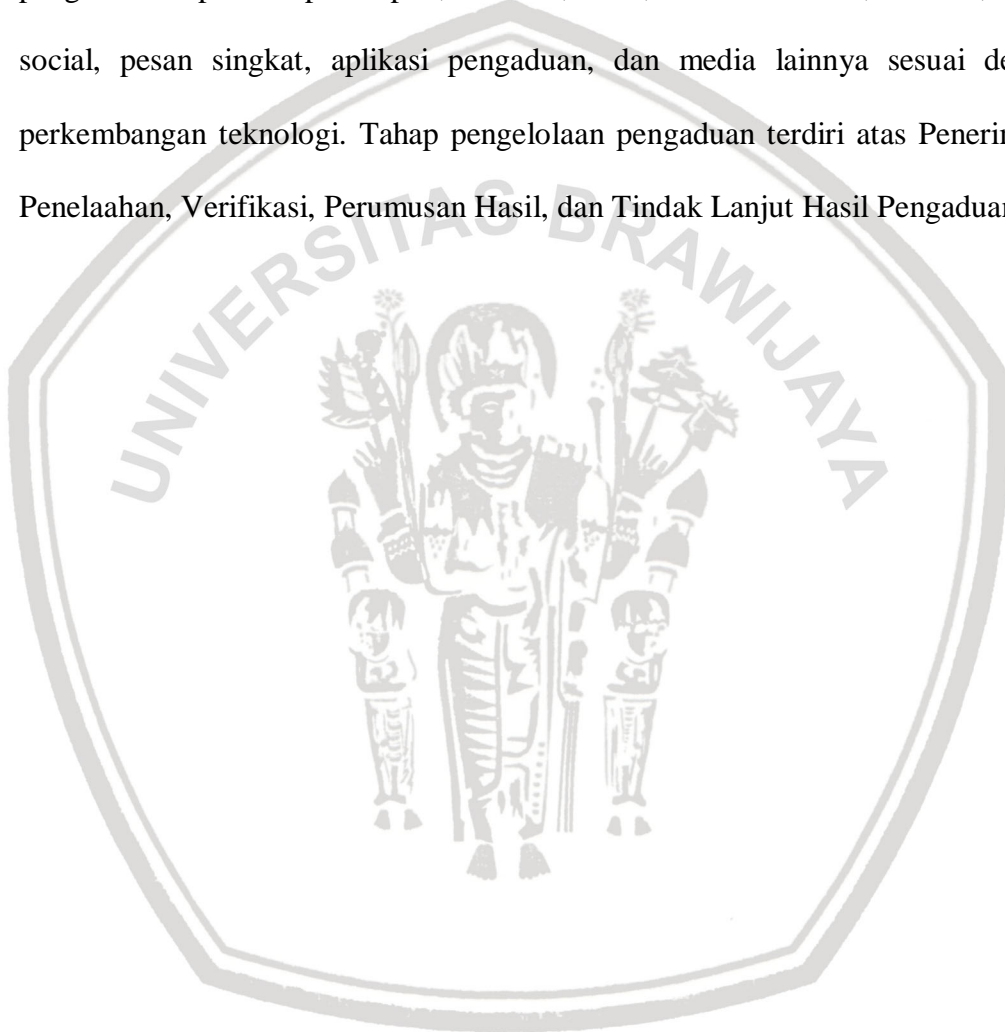
- 
- a. Usaha atau kegiatan yang tidak memiliki atau tidak sesuai dengan izin dibidang lingkungan hidup;
  - b. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
  - c. Perusakan hutan;
  - d. Pengelolaan limbah B3 yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. Pembalakan liar;
  - f. Pembakaran hutan dan lahan;
  - g. Penambahan kawasan hutan dan lahan;
  - h. Perburuan, peredaran, dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar illegal;
  - i. Konflik tenurial kawasan hutan;
  - j. Pemanfaatan sumber daya genetic dan pengetahuan tradisional;
  - k. Usaha atau keinginan lainnya yan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup, kehutanan, atau konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya

---

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.22 /MENLKH /SETJEN / SET.1 /3 /2017



Pengaduan dapat disampaikan kepada instansi penanggung jawab baik secara langsung maupun tidak langsung. pengaduan secara langsung dapat dilakukan dengan mendatangi dan menyampaikan pengaduan kepada sekretariat pengaduan atau pos pengaduan. Pengaduan secara tidak langsung dilakukan melalui media pengaduan dapat berupa telepon, faksimili, surat, surat elektronik, website, media social, pesan singkat, aplikasi pengaduan, dan media lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi. Tahap pengelolaan pengaduan terdiri atas Penerimaan, Penelaahan, Verifikasi, Perumusan Hasil, dan Tindak Lanjut Hasil Pengaduan.



## BAB V

### IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADUAN PERMASALAHAN

#### SAMPAH DI KOTA MALANG

Bab ini membahas secara terperinci mengenai implementasi kebijakan pengaduan permasalahan sampah di Kota Malang. Permasalahan ini akan dilihat dan dianalisis dengan menggunakan teori implementasi kebijakan public yang dikemukakan oleh Edwards III. Analisis implementasi tersebut akan dilihat dari aspek komunikasi, disposisi, sumber daya, dan birokrasi. Kemudian dalam bab ini juga akan dijelaskan faktor pendukung dan faktor penghambat dari pelaksanaan atau implementasi kebijakan pengaduan permasalahan sampah di Kota Malang.

#### **5.1 Analisis Implementasi Pengaduan Permasalahan Sampah di Kota Malang**

Penanganan pengaduan masyarakat terkait permasalahan lingkungan hidup di atur dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan juga Perwal Kota Malang No. 19 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penanganan Pengaduan. Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang merupakan implementor kunci dari kebijakan tersebut.

##### **5.1.1 Komunikasi**

Dengan adanya komunikasi yang baik dan akurat akan sangat menentukan keberhasilan dari implementasi kebijakan pengaduan permasalahan sampah di Kota Malang. Komunikasi dalam hal ini adalah bagaimana Dinas Lingkungan

Hidup Kota Malang memberikan sosialisasi secara langsung maupun melalui media sosial mengenai kebijakan pengaduan permasalahan lingkungan hidup di Kota Malang. Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang melakukan sosialisasi salah satunya menyebarkan spanduk ke berbagai tujuan baik itu masyarakat maupun instansi pemerintahan mengenai alur pengaduan terkait permasalahan lingkungan hidup yang terjadi disekitar. Dengan adanya sosialisasi tersebut, semakin membantu masyarakat untuk lebih memahami apa saja yang termasuk dalam permasalahan lingkungan hidup dan juga mampu menyampaikan keluhan baik itu secara langsung ataupun melalui media social yang ditujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang.

### 5.1.2 Sumber Daya

Gambar 5.1



Sumber: DLH Kota Malang

Sumber daya yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang dapat dinilai memadai dalam melaksanakan kebijakan permasalahan lingkungan hidup

yang dapat terjadi di Kota Malang. Untuk aparatur, Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang mempunyai Petugas Kebersihan dengan jumlah 786 personil, Petugas Komposting dengan jumlah 54 personil, dan juga dilengkapi dengan 18 personil sebagai Petugas Operator TPA.

Kemudian sumber daya yang berkaitan dengan kelengkapan operasional dinilai masih perlu untuk ditambahkan jumlahnya mengingat semakin meningkatnya permasalahan mengenai lingkungan hidup seperti dapat dicontohkan pada beberapa TPS sering dikeluhkan oleh masyarakat sekitar dikarenakan peralatan operasional yang tidak optimal dalam mengangkut sampah sehingga mengakibatkan menumpuknya sampah di TPS tersebut.

### **5.1.3 Struktur Birokrasi dan Disposisi**

Pada bagian ini akan menjabarkan bagaimana struktur birokrasi yang terdapat di Dinas Lingkungan Hidup. Peneliti menggabungkan variable Struktur Birokrasi dan Disposisi kedalam satu penjelasan dengan alasan bahwa di Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang dalam struktur kerjanya dinilai sudah sesuai mulai dari pengangkatan sampai penempatan anggota pada tugas dan wewenangnya masing-masing. Struktur ini yang kemudian saling berkoordinasi dengan setiap bagian yang terdapat di Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing.

## 1. Bidang Tata Lingkungan Hidup

- Bidang Tata Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

### Tugas dan Fungsi

- Bidang Tata Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang tata lingkungan
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tata Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
  1. perumusan kebijakan teknis di bidang tata lingkungan hidup;
  2. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang tata lingkungan hidup;
  3. koordinasi program di bidang tata lingkungan hidup;
  4. pengendalian dan pemantauan program di bidang tata lingkungan hidup; dan
  5. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program di bidang tata lingkungan hidup.

## 2. Bidang Bina Kemitraan dan Pengendalian Lingkungan Hidup

- Bidang Bina Kemitraan dan Pengendalian Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- Bidang Bina Kemitraan dan Pengendalian Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang kemitraan dan kerjasama lingkungan hidup, penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup, bina pengurangan dan pemilahan sampah.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Kemitraan dan Pengendalian Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
  1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Bina Kemitraan dan Pengendalian Lingkungan Hidup;
  2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Bina Kemitraan dan Pengendalian Lingkungan Hidup;
  3. Koordinasi program di bidang Bina Kemitraan dan Pengendalian Lingkungan Hidup;
  4. Pengendalian dan pemantauan program di bidang Bina Kemitraan dan Pengendalian Lingkungan Hidup; dan



5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program di bidang Bina Kemitraan dan Pengendalian Lingkungan Hidup.

### **3. Bidang Pelayanan Kebersihan**

- Bidang Pelayanan Kebersihan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang Pelayanan Kebersihan
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Kebersihan menyelenggarakan fungsi:
  1. perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan kebersihan;
  2. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pelayanan Kebersihan;
  3. pemantauan dan evaluasi program kegiatan di bidang Pelayanan Kebersihan;
  4. penyelenggaraan pembinaan teknis sumber daya di bidang Pelayanan Kebersihan; dan
  5. pelaksanaan administrasi di bidang Pelayanan Kebersihan.

### **4. Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup**

- Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
  - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
  - c. pemantauan dan evaluasi program kegiatan di bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
  - d. penyelenggaraan pembinaan teknis sumber daya di bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; dan
  - e. pelaksanaan administrasi di bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

## **5. Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup**

Sekretariat melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan

serta kearsipan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
2. Pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
3. Penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
4. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
5. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan keputakaan;
6. Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
7. Pengelolaan anggaran, barang dan retribusi;
8. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
9. Pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
10. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
11. Pengkoordinasian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
12. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
13. Pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
14. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
15. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam;
16. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *web site* Pemerintah Daerah;

17. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
18. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada sekretariat adalah Sekretaris yang membawahi masing-masing Subbagian yang dipimpin oleh Kepala Subbagian yaitu :

- Subbagian Penyusunan Program;
- Subbagian Keuangan;
- Subbagian Umum.

#### **6. UPT Labiratorium Lingkungan**

Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan analisis pemantuan lingkungan, laboratorium memiliki peran yang besar untuk mengetahui kualitas lingkungan dengan uji kualitas secara fisika, biologis maupun kimia. UPT Laboratorium Lingkungan merupakan unsur pelaksana operasional secara struktural bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

#### **Visi Dan Misi UPT Laboratorium Lingkungan**

##### **Visi :**

Menjadi loratorium lingkungan yang mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan.

##### **Misi :**

1. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM);
2. Mewujudkan pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana laboratorium sesuai standart SNI ISO/IEC17025:2008.

Peraturan Walikota Malang Nomor 71 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup.

1. UPT Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional pelayanan di bidang sampling dan analisa kualitas air sungai, sampling dan analisa kualitas air limbah, sampling dan analisa kualitas sedimen, sampling dan analisa kualitas tanah, sampling dan analisa kualitas udara ambient, sampling dan analisa kualitas udara kebauan, sampling dan analisa kualitas udara lingkungan kerja, sampling dan analisa kualitas emisi cerobong, sampling dan analisa kebisingan dan/atau bidang lain yang berkaitan dengan lingkungan hidup.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas :
  - a. Merencanakan program dan kegiatan UPT berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  - b. Memberi petunjuk kepada Pelaksana/Pejabat Fungsional/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pelayanan pemeriksaan di bidang sampling dan analisa kualitas air sungai, sampling dan analisa



kualitas air limbah, sampling dan analisa kualitas udara ambient, sampling dan analisa kualitas udara kebauan, sampling dan analisa kualitas udara lingkungan kerja, sampling dan analisa kualitas emisi cerobong, sampling dan analisa kebisingan dan/atau bidang lain yang berkaitan dengan lingkungan hidup;

- c. Memberi petunjuk kepada Pelaksana/Pejabat Fungsional/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pelayanan pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia dan/atau bidang lain yang berkaitan dengan kualitas lingkungan hidup;
- d. Memberi petunjuk kepada Pelaksana/Pejabat Fungsional/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka layanan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pemeriksaan laboratorium yang akan dilaksanakan;
- e. Memberi petunjuk kepada Pelaksana/Pejabat Fungsional/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pencatatan dan pelaporan mengenai pelaksanaan kegiatan laboratorium;
- f. Memberi petunjuk kepada Pelaksana/Pejabat Fungsional/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan peralatan laboratorium;
- g. Memberi petunjuk kepada Pelaksana/Pejabat Fungsional/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penyusunan laporan persediaan dan penggunaan bahan kebutuhan laboratorium;



- h. Mendistribusikan tugas kepada Pelaksana/Pejabat Fungsional/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. Membimbing Pelaksana/Pejabat Fungsional/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna pencapaian kinerja jabatannya;
- j. Memeriksa hasil kerja Pelaksana/Pejabat Fungsional/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya sebagai bahan evaluasi;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Pelaksana/Pejabat Fungsional/Bawahan sesuai target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja;
- l. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas jabatannya.

## **7. UPT Tempat Pembuangan Akhir**

- UPT TPA mempunyai tugas melaksanakan kegiatan memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan;
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT TPA mempunyai tugas :

- a. Merencanakan program dan kegiatan UPT berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. Memberi petunjuk kepada Pelaksana/Pejabat Fungsional/bawahan pada rencana penataan pemrosesan sampah di TPA sesuai rencana siteplan TPA;
- c. Memberi petunjuk kepada Pelaksana/Pejabat Fungsional/bawahan pada kegiatan teknis :
  - Melaksanakan pencatatan kendaraan/angkutan sampah yang masuk dan keluar TPA serta penimbangan sampah pada fasilitas penimbangan;
  - Menjaga keamanan dan ketertiban kawasan TPA;
  - Melaksanakan pengaturan, penataan sampah, penimbunan, dan pengisian sampah pada zona aktif;
  - Melaksanakan penutupan sampah dengan tanah (kaver) dan pengaturan pada zona pasif;
  - Melaksanakan pembersihan saluran, pengolahan dan pemantauan air lindi dan sumur pantau (tes laboratorium);
  - Melaksanakan penyaluran gas metan sebagai pengganti gas elpiji masyarakat sekitar TPA dan pemanfaatan listrik;
  - Melaksanakan kebersihan saluran drainase dan kebersihan kawasan TPA;
  - Melaksanakan penghijauan dan perawatan di zona pasif, sekitar jalan dan taman edukasi serta menjaga/menghindari kebakaran sampah terutama saat musim kemarau;

- Menjaga dan merawat sarana dan prasarana di TPA serta melaksanakan kegiatan TPA sebagai kawasan edukasi lingkungan;
- Melaksanakan pengolahan sampah sebagai bahan baku daur ulang dan/atau mengolahnya yang dapat bekerjasama dengan lembaga masyarakat dan swasta;
- Melaksanakan fasilitasi, pembinaan pada pemulung TPA dan masyarakat sekitar TPA;
- Melaksanakan revitalisasi zona pasif;
  - a. Mendistribusikan tugas kepada Pelaksana/Pejabat Fungsional/ bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  - b. Membimbing Pelaksana/Pejabat Fungsional/bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna pencapaian kinerja jabatannya;
  - c. Memeriksa hasilkerja Pelaksana/Pejabat Fungsional/bawahan sesuai bidang tugas jabatannya sebagai bahan evaluasi;
  - d. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Pelaksana/Pejabat Fungsional/ bawahan sesuai target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja;
  - e. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  - f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas jabatannya.

## 8. UPT Penampungan dan Pengolahan Sampah

UPT Penampungan dan Pengolah Sampah mempunyai tugas :

1. Menyusun program kerja UPT Penampungan dan Pengolah Sampah;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan berdasarkan kebijakan Kepala Dinas;
3. Pelaksanaan penampungan dan pengolahan sampah yang berkategori produktif dan mempunyai nilai ekonomis;
4. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan rumah PKD (Pilah Kompos Daur Ulang) dan TPS;
5. Memonitor dan mengevaluasi kegiatan pelayanan TPS;
6. Pelaksanaan pemasaran hasil daur ulang sampah;
7. Melaksanakan administrasi umum meliputi penyusunan program, tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, kehumasan dan rumah tangga UPT Penampungan dan Pengolah Sampah;
8. Melaksanakan fungsi Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah;
9. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
10. Penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
11. Melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
12. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
13. Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

14. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas ;dan
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

## 9. UPT Perbengkelan Angkutan Sampah

- UPT Perbengkelan Angkutan Sampah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan perbengkelan bagi angkutan sampah.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Perbengkelan Angkutan Sampah mempunyai tugas:
  1. Merencanakan program dan kegiatan UPT berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  2. Memberi petunjuk kepada Pelaksana/Pejabat Fungsional/bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pelayanan perbengkelan bagi kendaraan, peralatan dan angkutan sampah;
  3. Memberi petunjuk kepada Pelaksana/Pejabat Fungsional/bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pemeliharaan dan perbaikan alat mekanik barang milik Daerah;
  4. Memberi petunjuk kepada Pelaksana/Pejabat Fungsional/bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka penelitian dan perencanaan keperluan bahan dan/atau peralatan pemeliharaan dan perbaikan alat mekanik barang milik Daerah;



5. Memberi petunjuk kepada Pelaksana/Pejabat Fungsional/bawahan sesuai bidang tugas jabatannya dalam rangka pelaksanaan pekerjaan perbengkelan dan pertukangan lainnya guna memenuhi kebutuhan perbaikan dan pemeliharaan alat mekanik barang milik Daerah;
1. Mendistribusikan tugas kepada Pelaksana/Pejabat Fungsional/ bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
2. Membimbing Pelaksana/Pejabat Fungsional/bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna pencapaian kinerja jabatannya;
3. Memeriksa hasilkerja Pelaksana/Pejabat Fungsional/bawahan sesuai bidang tugas jabatannya sebagai bahan evaluasi;
4. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Pelaksana/Pejabat Fungsional/ bawahan sesuai target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja;
5. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
6. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas jabatannya.

## 5.2 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Dalam pelaksanaan kebijakan pengaduan permasalahan lingkungan hidup ini tentunya tidak mudah. Terdapat beberapa permasalahan yang akan dihadapi dalam pelaksanaannya. Adapun faktor pendukung dan penghambat yang ditemui



saat pelaksanaan kebijakan pengaduan permasalahan lingkungan hidup di Kota Malang yaitu:

### 5.2.1 Faktor Pendukung

Faktor yang mendukung didalam pelaksanaan kebijakan pengaduan permasalahan lingkungan hidup yaitu:

1. Terdapat aturan yang mendukung

Perwal Kota Malang No 19 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan pelayanan penanganan pengaduan di lingkungan Pemerintah Kota Malang, pada bab IV pasal 6 disebutkan dalam ayat (1) bahwa tiap SKPD, Perusahaan Daerah, UPT dan Sekolah Negeri berkewajiban menyelenggarakan pelayanan penanganan pengaduan pada masing-masing satuan/unit kerja. Kemudian pada ayat (2) bahwa dalam rangka menyelenggarakan pelayanan penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tiap-tiap SKPD, Perusahaan Daerah, UPT dan Sekolah Negeri berkewajiban menindaklanjuti setiap pengaduan yang diterima, menyediakan sarana pengaduan, menugaskan pelaksana pelayanan yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan, serta menyusun prosedur dan mekanisme pelayanan penanganan pengaduan di satuan/unit kerjanya dengan berpedoman pada Peraturan Walikota ini.

### 5.2.2 Faktor Penghambat

Dalam implementasi kebijakan pengaduan permasalahan lingkungan hidup juga tentu akan mengalami hambatan ketika pelaksanaannya. Pertama yaitu kurang adanya dukungan atau kesadaran masyarakat bahwa menjaga lingkungan hidup adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Adanya sikap acuh dari masyarakat sehingga tidak berkontribusi dalam pengaduan terhadap permasalahan lingkungan dan dinilai masih minim mengingat di Kota Malang terdapat berbagai permasalahan lingkungan baik itu mengenai sampah ataupun permasalahan lainnya.

Kemudian juga hambatan berikut yang tentunya dialami yaitu kurangnya sarana atau fasilitas pendukung yang mana dapat menyebabkan terhambatnya pelaksanaan penanganan permasalahan lingkungan hidup. Seperti kurangnya jumlah sarana dan prasarana dari pemerintah terkait pengelolaan sampah sehingga terjadi penumpukan di TPS beberapa wilayah. Hal ini tentunya akan menimbulkan permasalahan dan menghambat pelaksanaan pengelolaan sampah di wilayah Kota Malang.

## BAB VI

### PENUTUP

#### 1.1 Kesimpulan

Implementasi kebijakan pengaduan permasalahan lingkungan hidup adalah upaya Pemerintah Kota Malang dalam menangani permasalahan lingkungan hidup dengan memberikan fasilitas kemudahan kepada masyarakat dalam menyampaikan permasalahan terkait lingkungan hidup. Terdapat beberapa variable yang dapat digunakan untuk menilai bagaimana implementasi kebijakan dapat terlaksana dengan baik atau masih mengalami hambatan.

1. Dilihat dari segi komunikasi, yaitu bagaimana Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang memberikan sosialisasi secara langsung maupun melalui media sosial mengenai kebijakan pengaduan permasalahan lingkungan hidup di Kota Malang. Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang melakukan sosialisasi salah satunya menyebarkan spanduk ke berbagai instansi maupun ruang publik lainnya baik itu masyarakat maupun instansi pemerintahan mengenai alur pengaduan terkait permasalahan lingkungan hidup yang terjadi disekitar. Dengan adanya sosialisasi tersebut, semakin membantu masyarakat untuk lebih memahami apa saja yang termasuk dalam permasalahan lingkungan hidup dan juga mampu menyampaikan keluhan baik itu secara langsung ataupun

melalui media social yang ditujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang.

2. Dari segi sumber daya, Dinas Lingkungan Hidup dalam implementasi kebijakan masih dinilai belum optimal dengan adanya permasalahan mengenai sampah yang mana tidak segera diangkut oleh petugas dikarenakan minimnya jumlah prasarana sehingga belum dapat menyelesaikan kebutuhan untuk penanganan terkait permasalahan sampah di Kota Malang.
3. Dari segi struktur birokrasi dan disposisi sudah dinilai baik ketika mengamati perekrutan anggota atau pegawai dan ditempatkan sesuai dengan bidang keahliannya. Hal ini tentu akan berdampak baik dalam mendukung terlaksananya implementasi kebijakan pengaduan terkait permasalahan lingkungan hidup di Kota Malang.

## 1.2 Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang ditawarkan oleh peneliti terhadap Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang yaitu terkait publikasi mengenai apasaja yang termasuk dalam permasalahan lingkungan hidup sehingga masyarakat lebih memiliki kesadaran penuh untuk tidak melakukan hal-hal yang berakibat pada munculnya permasalahan lingkungan hidup. Pada umumnya, masyarakat dominan akan mengaitkan permasalahan lingkungan hidup dengan permasalahan sampah. Padahal terkait permasalahan lingkungan hidup ini bisa dari berbagai faktor seperti bagaimana pembangunan yang tidak berdasarkan lingkungan akan mengakibatkan permasalahan lingkungan hidup di Kota Malang.